



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204800771**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SOFTWAREONE INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot#5.1,,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 12950 |
| No. Telepon | : 0215761515 |
| Email | : meliyani.meliyani@softwareone.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Agustus 2019

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204800771

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46512 (Pendukung)	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
3	62090 (Pendukung)	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
4	62029 (Pendukung)	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 12950			oss.go.id	waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	63112	Aktivitas Hosting dan Ybdi	Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



← → ↻ 🏠 infokswp.pajak.go.id/home 📺 👤 Guest ⋮

Profil ▾ Peraturan ▾ Unduh ▾ Informasi Publik ▾ Internasional ▾ Pencarian...

djp Halo, SOFTWAREONE INDONESIA 👤

KSWP
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

Petunjuk Pengisian >

NIK / NPWP16	0028752871063000
NPWP15	028752871063000
NAMA WP	SOFTWAREONE INDONESIA
ALAMAT	GEDUNG MENARA RAJAWALI LT.18, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT. #5.1 - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

← → ↻ 🏠 infokswp.pajak.go.id/home 📺 👤 Guest ⋮

djp Halo, SOFTWAREONE INDONESIA 👤

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

⬆



KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN I

0028 7528 7106 3000

SOFTWAREONE INDONESIA



GEDUNG MENARA RAJAWALI LT.18, JL. DR. IDE ANAK AGUNG
GDE AGUNG LOT. #5.1 - NO.0 RT. 000 RW. 000, KUNINGAN
TIMUR, SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA

TANGGAL TERDAFTAR 26/05/2011



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwv.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SOFTWAREONE INDONESIA

NPWP : 028752871063000 / 0028752871063000

NITKU : 0028752871063000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : Rp. 7.465.202.654,00

Tanggal Penyampaian : 30/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 34871406591252030301

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK											
A NPWP		:	0 2	8 7 5	2 8 7	1	0 6 3	0 0 0			
B NAMA WAJIB PAJAK		:	PT SOFTWAREONE INDONESIA								
C JENIS USAHA		:	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI								
SPESIFIKASI USAHA		:									
D ALAMAT		:	GD. MENARA RAJAWALI LT. 18, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT. #5.1 KUNINGAN TIMUR SETIABUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA -								
E KELURAHAN/ KECAMATAN		:	KUNINGAN TIMUR SETIABUDI								
F KOTA/KODE POS		:	JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA					1	2	9	5 0
TANDA TANGAN		:									
WP/KUASA		:	UCOK DANIEL SIAHAAN (NPWP: 49.980.024.8-432.000)								

Perhatian : Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masuka

INDUK

BUKA

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

SPT PEMBETULAN KE 0

IDENTITAS

N P W P

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

JENIS USAHA

AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI

KLU 62021

NO TELP

628

-

1290862151

NO FAKS

-

PERIODE PEMBUKUAN

1

24

s.d.

12

24

☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

GEDUNG MENARA RAJAWALI LT.18, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT. #5.1 - NO.0 - K

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☒ DIAUDIT☐ TIDAK DIAUDIT

Wajar Tanpa Pengecualian

OPINI AKUNTAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG DAN

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

02.125.621.9-062.000

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

(1)

(2)

(3)

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)

1

-13.493.655.201

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

2

0

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

3

0

B. PPh TERUTANG

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

☒ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri

4

0

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

5

0

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

6

0

C. KREDIT PAJAK

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

7

0

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)

8a

7.465.202.654

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)

8b

0

c. JUMLAH (8a + 8b)

8c

7.465.202.654

9. (6 - 7 - 8c)

☐ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI☒ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

9

(7.465.202,654)

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN

10a

0

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)

10b

0

c. JUMLAH (10a + 10b)

10c

0

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR

11. (9 - 10c)

☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)☒ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

11

(7.465.202,654)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

Tanggal

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

☒ DIRESTITUSIKAN☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Formulir 1771

Halaman 2

		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 26.299.350.434
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 0
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKU PERKOTA / PPh PASAL	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b 0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☒ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☐ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☒ LAPORAN KEUANGAN c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☒ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. ☒ LAMPIRAN 1-6 n. ☒ TANDA TERIMA NOTIFIKASI LAPORAN ANTAR NEGARA	

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAKb. ☐ KUASAc. d.

(Tempat)

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c.

N P W P

d.

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2 0 2 4

IDENTITAS

N P W P : 0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : SOFTWAREONE INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a. 933.861.344.944
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 858.563.827.767
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 74.270.660.043
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d. 1.026.857.134
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 66.851.262
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 20.077.122.213
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g. -20.010.270.951
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h. -18.983.413.817
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3. -18.983.413.817
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4. 66.851.262
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a. 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b. 1.819.418.847
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c. 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d. 0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e. 0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f. 1.930.611.724
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g. 0
	h. Sanksi Administrasi	5h. 0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i. 14.283.096
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j. 0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l. 1.819.874.589
	m. JUMLAH 5a s.d 5i :	5m. 5.584.188.256
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b. 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 27.578.378
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e. 27.578.378
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8. -13.493.655.201

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 2 4

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

N P W P :

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

SOFTWAREONE INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN :

1 24 s.d. 12 24

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	858.563.827.767	0	0	858.563.827.767
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	40.812.678.145	0	40.812.678.145
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	1.385.919.936	0	1.385.919.936
5	BIAYA SEWA	0	1.103.876.728	0	1.103.876.728
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	8.114.944.816	8.114.944.816
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	3.681.567.017	0	3.681.567.017
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	894.743.132	0	894.743.132
11	BIAYA LAINYA	0	26.391.875.085	11.962.177.397	38.354.052.482
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	858.563.827.767	74.270.660.043	20.077.122.213	952.911.610.023

Catatan:

- o Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- o Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- o Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

- o Nomor 6, **Biaya Bunga Pinjaman** maka harus melampirkan dokumen **DER (Debt to Equity Ratio)**
- o Nomor 10, **Biaya Pemasaran/Promosi** maka harus melampirkan dokumen **Daftar Nominatif**

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

BUKA

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS	N P W P	: 0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	: SOFTWAREONE INDONESIA
	PERIODE PEMBUKUAN	: 1 24 s.d. 12 24		

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INSTITUT TEKNOLOGI BA	0026294959441000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	83.519.080	1.670.382	2000012501	27/12/2024	JALAN TAMANSARI BLG	0
	INSTITUT TEKNOLOGI BA	0026294959441000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	104.583.293	2.091.666	2000012531	27/12/2024	JALAN TAMANSARI BLG	0
	GLOBAL KOMUNIKASI MA	0032034241076000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	133.933.320	2.678.666	2000000100	02/12/2024	GEDUNG RANUZA, JL. T	0
	GLOBAL KOMUNIKASI MA	0032034241076000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	134.733.320	2.694.666	2000000102	12/12/2024	GEDUNG RANUZA, JL. T	0
	LEMBAGA PENJAMIN SIM	0010612554093000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	45.000.000	900.000	2000006160	11/12/2024	GEDUNG EQUITY TOWE	0
	LEMBAGA PENJAMIN SIM	0010612554093000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	43.200.000	864.000	2000006174	11/12/2024	GEDUNG EQUITY TOWE	0
	GLOBAL KOMUNIKASI MA	0032034241076000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	12.432.000	248.640	2000000101	12/12/2024	GEDUNG RANUZA, JL. T	0
	SILOAM INTERNATIONAL	0017881392054000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	8.558.558.550	171.171.171	2000004748	31/12/2024	GDG FAK. KEDOKTERA	0
	SILOAM INTERNATIONAL	0017881392054000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	14.106.166.900	282.123.338	2000004757	31/12/2024	GDG FAK. KEDOKTERA	0
	PT PERTAMINA POWER IN	0803405703081000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	1.271.998.538	25.439.971	2000001221	28/12/2024	GEDUNG GRHA PERTA	0
	INOVASI NIAGA INTEGRA	0605198068061000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	375.309.819	7.506.196	2000000115	31/12/2024	GEDUNG GRAHA KRAM	0
	MICROSOFT INDONESIA	0010713550058000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	149.120.000	2.982.400	2000000762	26/12/2024	GD. BEJ TOWER II LT. 4	0

JUMLAH PPH

7.465.202.654

Tambah

Hapus

Data ke- 402

Prev

Rows 391 to 402 of 402

TOTAL JUMLAH PPH

7.465.202.654

Catatan :

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pph FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS

N P W P

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN

1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	83.564.077	20	16.712.815
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				16.712.815

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN A

16.712.815

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN B

0

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS

N P W P : 0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : SOFTWAREONE INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SOFTWAREONE AG	RIJEDENMATT 4,6370 STANS	00.000.000.0-000.000	199,248,212.925	99,97	0
2.	SOFTWAREONE PTE LTD	150 BEACH RD #31-100 SINGA	00.000.000.0-000.000	59.790.267	0,03	0

	JUMLAH BAGIAN A	JBA	199.308.003.192	100	0
--	-----------------	-----	-----------------	-----	---

Tambah

Hapus

Data ke-

2

Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPHAEL HERMANN ERB	150 BEACH ROAD #31-00 GATEWAY WEST SINGA	00.000.000.0-000.000	DIREKTUR UTAMA
2.	UCOK DANIEL SIAHAAN	CITRA GRAN BLOK B5/20 RT 001 RW 011	49.900.024.8-432.000	DIREKTUR
3.	FRANK ARNOLDO ROSSINI	REIDENMATT 4,6370 STANS, SWITZERLAND	00.000.000.0-000.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke-

3

Rows 1 to 3 of 3

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP	:	0287528710630000
	NAMA WAJIB PAJAK	:	SOFTWAREONE INDONESIA
	PERIODE PEMBUKUAN	:	124 s.d. 1224

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN
1.	SOFTWAREONE AG - GERMANY	00.000.000.0-000.000	394.541.900.000	2024	0

Tambah

Hapus

Data ke-

1

Rows

1

to

1

of

1

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 2 4

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
71	Harta Berwujud	Kelompok 1	HARDWARE	9	2024	24.324.324	0	Garis Lurus	Garis Lurus	2.027.027	71 LENOVO T14
72	Harta Berwujud	Kelompok 1	HARDWARE	9	2024	24.324.324	0	Garis Lurus	Garis Lurus	2.027.027	72 LENOVO T14
73	Harta Berwujud	Kelompok 1	HARDWARE	9	2024	24.324.324	0	Garis Lurus	Garis Lurus	2.027.027	73 LENOVO T14
74	Harta Berwujud	Kelompok 1	FIXTURE	11	2024	50.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	2.083.333	74 TV 75INC FOR
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL.....										506.442.900	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL.....										520.725.996	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 Huruf a										-14.283.096	

Tambah

Hapus

Data ke- 74

Prev

Rows 71 to 74 of 74

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH AMORTISASI FISKAL.....										0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL.....										0	
SELISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 Huruf b										0	

Tambah

Hapus

Data ke- 0

Rows -4 to 0 of 0

LAMPKHUS 2A

BUKA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2024
PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2024 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

2A

N P W P

:

0287528710630000

NAMA WAJIB PAJAK :

SOFTWAREONE INDONESIA

NO	KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
	TAHUN	RUPIAH	TH. 2020 (RUPIAH)	TH. 2021 (RUPIAH)	TH. 2022 (RUPIAH)	TH. 2023 (RUPIAH)	TH. 2024 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH*)	TH. 2025 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2014	0	0	0	0	0	0	0
2.	2015	0	0	0	0	0	0	0
3.	2016	-4.059.352.981	0	0	0	0	0	0
4.	2017	346.752.381	0	0	0	0	0	0
5.	2018	-4.037.989.079	0	0	0	0	0	0
6.	2019	-1.499.692.719	0	0	0	0	1.499.692.719	1.499.692.719
7.	2020	-7.395.739.949	0	0	0	0	7.395.739.949	7.395.739.949
8.	2021	-17.403.917.766	0	0	0	0	17.403.917.766	17.403.917.766
9.	2022	192.561.075	0	0	0	0	0	0
10.	2023	4.947.880.062	0	0	0	0	0	0
11.	2024	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		JML	0	0	0	0	26.299.350.434	26.299.350.434

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK **2 0 2 4****PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA**NPWP : **0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0**NAMA : **SOFTWAREONE INDONESIA****I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER	KEGIATAN USAHA	BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP
1.	SOFTWAREONE AG - SWITZELAND	RIEDENMATT 4, 6370 STANS, SWITZERLAND	CHE-107.401.257	PERUSAHAAN IT	Hubungan istimewa karena kepemilikan
2.	SOFTWAREONE DEUTSCHLAND GMBH	BLOCHSTRABE 1 04329 LEIPZIG, DEUTSCHLAND	DE141626867	PERUSAHAAN IT	Hubungan istimewa karena penguasaar

Tambah

Hapus

Data ke-

2Rows **1** to **2** of **2****II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA**

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	METODE PENETAPAN HARGA	ALASAN PENGGUNAAN METODE
-----	----------------------	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows **0** to **0** of **0**

LAMPIRAN KHUSUS

3A-1

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

PENYERTAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : SOFTWAREONE INDONESIA

- I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI
Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman.
- 1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
- ☐ ☒ Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
- ☐ ☒ Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
- ☐ ☒ Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.
- ☐ ☒ Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci
- 2 Mengenai Transaksi
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
- ☒ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa.
- ☒ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.
- ☒ ☐ Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
- 3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
- ☒ ☐ Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.
- ☒ ☐ Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.
- ☐ ☒ Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.
- ☒ ☐ Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.
- ☐ ☒ Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.
- 4 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
- ☒ ☐ Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.
- ☐ ☒ Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.
- ☐ ☒ Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK **2 0 2 4****PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA**NPWP : **0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0**NAMA : **SOFTWAREONE INDONESIA****I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA *TAX HAVEN COUNTRY***

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA☐ Ya☐ Tidak

Reset

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM

b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1. NOMOR : 1. NOMOR : 2. TANGGAL : 2. TANGGAL :

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1. DALAM VALAS : 2a1 0 MATA UANG

2. EQUIVALEN Rp : 2a2 0 *)

3. DALAM Rp : 2a3 0

4. JUMLAH Rp : 2a4 0

b. PENANAMAN MODAL : 1 ☐ BARU 2 ☐ PERLUASANc. DI BIDANG DAN / ATAU DI DAERAH : d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 ☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO2 ☐ PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT3 ☐ KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN5 ☐ PENGURANGAN 50% TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a. 0b. S.D TAHUN INI : Rp. b. 04. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERIAL (SMBK) TANGGAL : 5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a 0 b Rp. 0 **)

5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

*) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I ANGKA 7 KOLOM (3)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

5A

TAHUN PAJAK

2	0	2	4
---	---	---	---

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

N P W P

028752871063000/0028752871063000

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

Import Data

NO	NAMA CABANG UTAMA	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows0to0of0

CATATAN:

APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 2 4

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP :	0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :	SOFTWAREONE INDONESIA

		RUPIAH PENUH
1.	PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	0
2.	PENYESUAIAN FISKAL :	
	a. POSITIF : Rp	0
	b. NEGATIF : Rp	0
	c. JUMLAH (a-b) :	0
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL : (1+/- 2c)	0
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	0
5.	DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3-4).....	0
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4) :	0
	a ☐ TERUTANG : 0 *) % X JUMLAH ANGKA 5	0
	b ☐ TIDAK TERUTANG, KARENA:	
	c ☐ KETENTUAN P3B INDONESIA -	
	d ☐ DITANAMKAN KEMBALISELUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
	NPWP : e	
	ALAMAT : f	
	g KOTA :	
	KODE POS : h	

CATATAN :

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

**) LMPIRKAN BUKTI REALISASI PENAMAAN KEMBALI

LAMPKHUS 7A

BUKA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**7A****TAHUN PAJAK**

2 0 2 4

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

N P W P

0 2 8 7 5 2 8 7 1 0 6 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

SOFTWAREONE INDONESIA

Import Data

NO	NAMA PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	MATA UANG (VALAS)	JUMLAH NETO (VALAS)	TANGGAL	KURS KMK (Rp)	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK TERUTANG (VALAS)	PAJAK TERUTANG (RUPIAH)	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH							JML	0	0	0	0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

CATATAN:

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (11) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (10) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (11) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (12) KE [FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.](#)
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (9) KE [FORMULIR 1771 - I Nomor 2.](#)
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN.

of

PT SOFTWAREONE INDONESIA NPWP: 02.875.287.1-063.000	
DAFTAR LAMPIRAN SPT PPH 1771 Tahun 2024 (JANUARI 2024 - DESEMBER 2024)	
Lampiran 1	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2024 (Januari 2024 - Desember 2024)
Lampiran 2	Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2025 (Januari 2025 - Desember 2025)
Lampiran 3	Daftar Nominatif Biaya Perjamuan dan Sejenisnya
Lampiran 4	Penghitungan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negeri
Lampiran 5	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal
Lampiran 6	Surat Keterangan Tidak Memiliki NPWP

Jakarta, 30 April 2025

Ucok Daniel Siahaan

Direktur

PT SOFTWAREONE INDONESIA		Lampiran 1
NPWP: 02.875.287.1-063.000		
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2024 (Januari 2024 - Desember 2024)		
Laba (Rugi) Komersial		(18,983,413,817)
Penghasilan yang dikenakan PPh Final		66,851,262
Koreksi Fiskal Positif		
- Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan	(1,819,418,847)	
- Penggantian atau Imbalan Pekerjaan dalam bentuk Natura	(24,668,245)	
- Pajak Penghasilan	(1,930,611,724)	
- Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal	(14,283,096)	
- Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	(1,795,206,344)	
Total Koreksi Fiskal Positif		(5,584,188,256)
Koreksi Fiskal Negatif		
- Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	27,578,378	
Total Koreksi Fiskal Negatif		27,578,378
Laba/ (Rugi) Fiskal		(13,493,655,201)
Kompensasi Kerugian		
- Kompensasi kerugian periode Tahun Pajak 2019	(1,499,692,719)	
- Kompensasi kerugian periode Tahun Pajak 2020	(7,395,739,949)	
- Kompensasi kerugian periode Tahun Pajak 2021	(17,403,917,766)	
Total Kompensasi Kerugian		(26,299,350,434)
Rugi Fiskal setelah kompensasi kerugian		(39,793,005,635)
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 23	7,465,202,654	
- PPh Pasal 22	-	
- PPh Pasal 25	-	
Pajak (Lebih) / Kurang Bayar		(7,465,202,654)

Jakarta, 30 April 2025

Ucok Daniel Siahaan
Direktur

PT SOFTWAREONE INDONESIA		Lampiran 2
NPWP: 02.875.287.1-063.000		
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2025 (Januari 2025 - Desember 2025)		
Laba Fiskal		(13,493,655,201)
<u>Beban / (Penghasilan) tidak teratur:</u>		
- Laba selisih kurs		11,770,471,485
		11,770,471,485
Rugi Fiskal - setelah penyesuaian beban tidak teratur		(1,723,183,716)
Kompensasi Kerugian		
- Rugi periode Tahun Pajak 2019		(1,499,692,719)
- Rugi periode Tahun Pajak 2020		(7,395,739,949)
- Rugi periode Tahun Pajak 2021		(17,403,917,766)
		(26,299,350,434)
Rugi Fiskal setelah Kompensasi Kerugian		(28,022,534,150)
Pajak Penghasilan Badan Terutang		-
<u>Kredit Pajak</u>		
- PPh Pasal 23		7,465,202,654
- PPh Pasal 22		-
Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2025		-
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2025 (dasar perhitungan : 12)		NIHIL

Jakarta, 30 April 2025

Ucok Daniel Siahaan
Direktur



LAMPIRAN

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2

0

2

4

LAMPIRAN 4

PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

NPWP	:	0 2	8 7 5	2 8 7	1	0 6 3	0 0 0	
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T	S O F	T W A R	E O N	E I N	D O N	

I. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

Pemberi Pinjaman		SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												
Nama	Hubungan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-Rata
SOFTWAREONE AG	AFILIASI	(100,992)	(84,699)	(45,980)	(47,140)	(30,894)	(31,156)	(30,970)	(106,250)	(126,799)	(131,463)	(101,022)	(394,542)	(102,659)
Jumlah		(100,992)	(84,699)	(45,980)	(47,140)	(30,894)	(31,156)	(30,970)	(106,250)	(126,799)	(131,463)	(101,022)	(394,542)	(102,659)

II. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												
	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-Rata
Modal Saham	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)	(199,308)
Agio Saham													
Laba Ditahan	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102	123,102
Saldo Laba	(319)	(462)	1,573	2,319	12,378	6,826	(2,274)	(16,135)	631	11,403	(11,342)	14,848	1,621
Jumlah	(76,525)	(76,668)	(74,633)	(73,887)	(63,828)	(69,380)	(78,480)	(92,341)	(75,576)	(64,804)	(87,548)	(61,358)	(74,586)

III. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

Penghitungan DER

=

Jumlah saldo rata-rata utang

Jumlah saldo rata-rata modal

=

-

-

102,659

74,586

=

1.38

:

1

IV. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Pemberi Pinjaman	Saldo Rata-rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP
DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT INI

Jakarta

(tgl)

30

(bln)

04

(thn)

2025

Wajib Pajak

(Ucok Daniel Siahaan)



LAMPIRAN 4

2	0	2	4
---	---	---	---

[illegible]

JAKARTA,

(Tgl)
30

(Bln)
04

(Thn)
25

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI
DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN FORMAT INI**

WAJIB PAJAK / KUASA

(Ucok Daniel Siahaan)

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL			LAMPIRAN 5
TAHUN PAJAK : 2024			
N P W P : 02.875.287.1-063.000			
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : PT SOFTWAREONE INDONESIA			
I	IKHTISAR DOKUMEN INDUK Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (<i>arm's length principle</i>), yang memuat informasi mengenai Grup Usaha sebagai berikut: ☒ Struktur dan Bagian Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-masing Anggota Grup Usaha. ☒ Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha. ☒ Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha. ☒ Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha. ☒ Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.		

☒

Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak.

☒

Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak.

☒

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

☒

Informasi Keuangan Wajib Pajak.

☒

Peristiwa-peristiwa/Kejadian-kejadian/Fakta-fakta Non-Keuangan yang Memengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba.

1. dokumen induk telah tersedia pada tanggal

tgl	bulan	tahun
30	4	2025

2. dokumen lokal telah tersedia pada tanggal

30	4	2025
----	---	------

Jakarta, 30 April 2024

Wajib Pajak / ~~kuasa~~

UCOK DANIEL SIAHAAN

DIREKTUR



SUWANDA, SH., MKn.

NOTARIS

Jl. H.R. Lukman (Bekas Pasar Lama Cibinong) No. 28 Cibinong

Telp. 021-8752181, HP. 0817 9171 516

KABUPATEN BOGOR

Akta **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

..... **"PT. SOFTWAREONE INDONESIA"**

Tanggal **16 Mei 2011.-**

Nomor **9.-**

Salinan/Grosse

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. SOFTWAREONE INDONESIA"

Nomor : 9.-

KANTOR NOTARIS
SUWANDA, S.H., M.Kn
KABUPATEN BOGOR



-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 16 (enam belas) Mei 2011 (dua ribu sebelas), -
pukul 15:00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berada dihadapan saya, SUWANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris berkedudukan di Cibinong - Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para -----
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya **KENCANAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei ----
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Banteng, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275025005740024, -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa -
yang dibuat secara dibawah-tangan, tanggal 13 (tiga belas) Mei 2011 (dua ribu
sebelas), bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu foto ---
copynya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari untuk dan atas ----
nama : -----

1. Tuan PATRICK DIMITRI WINTER, lahir di Winterthur ZH, pada tanggal -
30 (tiga puluh) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ---
Negara Switzerland, swasta, pemegang Paspor Nomor X1527932, -----
bertempat tinggal di Gutstrasse 17, CH-8400 Winterthur; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan
karenanya sah dan berwenang mewakili perseroan untuk dan atas nama --
SOFTWAREONE AG, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan ----
tunduk pada hukum negara Switzerland; -----

2. Tuan NG SHOU CHUAN, lahir di Sarawak, pada tanggal 5 (lima) Maret ---
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Malaysia, swasta, -
pemegang Paspor Nomor K23177463, bertempat tinggal di 2 Jurong East ---

Street 21 #02-181 IMM Building, Singapore 609601; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya sah dan berwenang mewakili perseroan untuk dan atas nama --
SOFTWAREONE Pte Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapore; -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan ----- setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka -- Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), beserta semua peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh ---- Badan Kordinasi Penanaman Modal tanggal 9 (sembilan) Mei 2011 (dua ribu --- sebelas), Nomor 01364/1/PPM/PMA/2011, dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat ----- dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = PASAL 1 = -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- = "**PT. SOFTWAREONE INDONESIA**" = -----

-selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di Kota ---- Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di ---- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan - oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

----- = PASAL 2 = -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada ----- tanggal anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang ---- dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (dua - ribu tujuh) tentang Penanaman Modal Asing serta semua peraturan -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, S.H., M.Kn
KABUPATEN BOGOR

pelaksanaanya. -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = PASAL 3 = -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang --
jasa konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang usaha konsultasi manajemen ----
perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, layanan pembelian perangkat -----
lunak; -----

----- = MODAL = -----

----- = PASAL 4 = -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 857.700.000,- (delapan ratus lima -
puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) (US\$. 100.000.- seratus ribu Dollar
Amerika Serikat) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing -
saham bernilai nominal Rp. 8.577,- (delapan ribu lima ratus tujuh puluh ----
tujuh Rupiah) (US\$.1.- satu Dollar Amerika Serikat); -----
2. Seluruh modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus ---
persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp. 857.700.000,- delapan ratus lima puluh tujuh juta ----
tujuh ratus ribu Rupiah (US\$. 100.000.- seratus ribu Dollar Amerika -----
Serikat), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian -
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

----- = SAHAM = -----

----- = PASAL 5 = -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga ----
negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan -
hukum asing; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----

dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ----
oleh perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai -
surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) ----

orang Direktur dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -----

Komisaris lainnya sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris; -----

----- = PENGGANTI SURAT SAHAM = -----

----- = PASAL 6 = -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ----

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah

surat saham yang rusak atau tidak dipakai tersebut diserahkan kembali -----

kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan --

dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, S.H., M.Kn
KABUPATEN BOGOR

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat ----
(4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif --
saham pengganti. -----

----- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----

----- = PASAL 7 = -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -
ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan --
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat -----
menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30
(tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui -----
pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ---
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang -
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari --
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham --
tidak diperkenankan. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = PASAL 8 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum -----
Pemegang Saham adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini ini -----
berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan Lain. --
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -----
yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang ---
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan --
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -----
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -----
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, S.H., M.Kn
KABUPATEN BOGOR

serta Anggaran Dasar. -----

----- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS = -----

----- = PASAL 9 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau ditempatkan perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -----
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat ----
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----
Pemegang saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu --
sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin -----
oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang ---
Saham dipimpin oleh wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang --
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. ---
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang ---
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh ---
dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- = PASAL 10 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum -----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----
ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- = DIREKSI = -----

----- = PASAL 11 = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) -----
anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat -
diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk ----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih semua anggota ----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, --
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----



KANTOR NOTARIS
SUWANDA, S.H., M.Kn
KABUPATEN BOGOR

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -----
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -----
dan/atau anggaran dasar; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI = -----

----- = PASAL 12 = -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan -----
mengenai pengelolaan dan/atau kepemilikan, dengan pembatasan bahwa -
untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----
termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta
tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan -----
Perseroan; -----
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik
di dalam maupun di luar negeri; -----
-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut -
ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris atau salah seorang anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan putusan Dewan Komisaris. ---
2. a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk --

dan atas nama Direksi serta memiliki Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab --
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- = RAPAT DIREKSI = -----

----- = PASAL 13 = -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu, apabila -----
dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ---
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi -----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama -----
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----

- pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh ----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan rapat direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat ----
Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai --
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan ----
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan --
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- = DEWAN KOMISARIS = -----

----- = PASAL 14 = -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, -
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -----
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan ---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dengan tidak mengurangi -----
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk mengisi lowongan --
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
5. Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -
dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyarat perundang-undangan dan/atau -----
anggaran dasar; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -

----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS = -----

----- = PASAL 15 = -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ---

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan ----
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -----
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris ---
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan --
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ---
komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- = RAPAT DEWAN KOMISARIS = -----

----- = PASAL 16 = -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku ----
bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- = RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN = -----

----- = LAPORAN TAHUNAN = -----

----- = PASAL 17 = -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan -
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -----
sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---
akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap ----
tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan -----

dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal ---
panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan. -----

----- = PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN = -----

----- = PASAL 18 = -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -----
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

----- = PENGGUNAAN DANA CADANGAN = -----

----- = PASAL 19 = -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai ----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya --
boleh di pergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----
dana cadangan lain. -----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), -
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum -----

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat Menurut penimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- = KETENTUAN PENUTUP = -----

----- = PASAL 20 = -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-Akhirnya penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 857.700.000,- delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah (US\$. 100.000,- seratus ribu Dollar Amerika Serikat), yaitu oleh para pendiri sebagai berikut:

a. **SOFTWAREONE AG** tersebut, sejumlah 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 849.123.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu Rupiah) atau sama dengan US\$. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);

b. **SOFTWAREONE Pte Ltd** 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.577.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) atau sama dengan US\$. 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat);

-Sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 857.700.000,- (delapan -----
ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) -----
atau sama dengan US\$. 100.000,-
(seratus ribu Dollar Amerika Serikat). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran dasar ini --
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah -----
diangkat sebagai : -----

-DIREKSI : -----

-Direktur : Tuan RAPHAEL HERMAN ERB; -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris : Tuan PATRICK DIMITRI WINTER; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

3. Memberi kuasa kepada Notaris pembuat akta ini untuk memohon pengesahan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas ----
anggaran dasar ini, melakukan perubahan-perubahan dalam rangka -----
memperoleh pengesahan tersebut; -----

-Akhirnya Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas penghadap dan mereka ---
sesuai tanda pengenal dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada ----
saya, Notaris, dan selanjutnya bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami isi akta ini dan apa ----
yang termuat dalam akta ini telah sesuai dengan kehendak serta keinginannya. --

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Cibinong, pada hari dan tanggal seperti tersebut ----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

-Tuan AGUNG MUSTAKIM, lahir di Sukabumi, pada tanggal 23 (dua puluh
tiga) Pebruari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Selabintana nomor --

88, Gang Mesjid, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3272022302750001; -----
-Tuan MISBAHUDIN, lahir di Sukabumi, pada tanggal 19 (sembilan belas) --
Pebruari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Siliwangi, gang prana, -----
Nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cikole, ----
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3272021902860001; -----
-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-30828.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 9, tanggal 16 Mei 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Suwanda, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 20 Juni 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. SOFTWAREONE INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 9, tanggal 16 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Suwanda, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH

NOTARIS

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI

No. : C-561.HT.03.02. Th - 2003 Tanggal : 22 Oktober 2003

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SOFTWAREONE INDONESIA

TANGGAL : 16 Januari 2025 NOMOR : 3530.-

KINDO SQUARE

Blok C3-C4, Jl. Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta 12760

Telp. (021) 7918 4311, 7919 9066, 798 7680

WhatsApp ☎ 0821 2230 2003 - 0812 8326 6288

Email : notarishesti@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SOFTWAREONE INDONESIA**

Nomor : 3530.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-01-2025 (enam belas Januari dua ribu -----
dua puluh lima). -----
- Pukul 08.10 WIB (delapan lewat sepuluh menit, Waktu Indonesia bagian ----
Barat). -----
- Hadir di hadapan saya, HESTI SULISTIATI BIMASTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah dikenal oleh -----
saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : --
- Tuan MOHAMMAD IQBAL HADROMI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 11-10-1972 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua), Pengacara, beralamat di Jakarta, Jalan Kertanegara -----
nomor 72 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa --
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3174021110720003; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang ----
tercantum dalam UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTION OF -----
SHAREHOLDERS OF PT. SOFTWAREONE INDONESIA IN LIEU OF -----
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -----
tertanggal 09-01-2025 (sembilan Januari dua ribu dua puluh lima), -----
("Keputusan Tertulis"), dibuat di bawah tangan, yang aslinya dilekatkan -----
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama pemegang saham PT. SOFTWAREONE INDONESIA, suatu -----
perseroan terbatas berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendiriannya tertanggal -----
16-05-2011 (enam belas Mei dua ribu sebelas), nomor : 9, dibuat di -----
hadapan SUWANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Bogor, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian -----



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
 Keputusannya tertanggal 20-06-2011 (dua puluh Juni dua ribu sebelas), -----
 nomor : AHU-30828.AH.01.01.Tahun 2011, diubah dengan akta tertanggal --
 07-12-2012 (tujuh Desember dua ribu dua belas), nomor : 4, dibuat di -----
 hadapan SUWANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
 Kabupaten Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
 Keputusannya tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga -----
 belas), nomor : AHU-01435.AH.01.02.Tahun 2013, diubah dengan akta -----
 tertanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu lima belas), -----
 nomor : 1618, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
 perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 20-11-2015 (dua puluh ---
 November dua ribu lima belas), nomor : AHU-AH.01.03-0982362 dan -----
 nomor : AHU-AH.01.03-0982363, diubah dengan akta tertanggal -----
 26-02-2018 (dua puluh enam Februari dua ribu delapan belas), nomor : 23, -
 dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
 Surat Keputusannya tertanggal 27-02-2018 (dua puluh tujuh Februari -----
 dua ribu delapan belas), nomor : AHU-0004563.AH.01.02.Tahun 2018, -----
 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -----
 database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal -----
 27-02-2018 (dua puluh tujuh Februari dua ribu delapan belas), -----
 nomor : AHU-AH.01.03-0085824, diubah dengan akta tertanggal -----
 24-08-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas), nomor : 22, -
 dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----

Surat Keputusannya tertanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ----
ribu delapan belas), nomor : AHU-0017924.AH.01.02.Tahun 2018, yang -----
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database ----
Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 31-08-2018 ----
(tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas), -----
nomor : AHU-AH.01.03-0238064, diubah dengan akta tertanggal -----
21-11-2018 (dua puluh satu November dua ribu delapan belas), -----
nomor : 23, dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan ---
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga -----
November dua ribu delapan belas), -----
nomor : AHU-0026735.AH.01.02.Tahun 2018, yang pemberitahuan -----
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 23-11-2018 (dua puluh ----
tiga November dua ribu delapan belas), nomor : AHU-AH.01.03-0267004, ----
diubah dengan akta tertanggal 26-08-2019 (dua puluh enam Agustus dua ----
ribu sembilan belas), nomor : 18, dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database ----
Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 05-09-2019 ----
(lima September dua ribu sembilan belas), -----
nomor : AHU-AH.01.03-0326776, diubah dengan akta tertanggal -----
04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), nomor : 283, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua -----
puluh satu), nomor : AHU-0033363.AH.01.02.TAHUN 2021, yang -----

pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
 Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 10-06-2021 -----
 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu), nomor : AHU-AH.01.03-0366448, -----
 diubah dengan akta tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh -----
 tiga), nomor : 361, dibuat di hadapan saya, Notaris, dan di tegaskan -----
 kembali dengan akta tertanggal 03-11-2023 (tiga November dua ribu dua -----
 puluh tiga), nomor : 302, dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----
 mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-11-2023 -----
 (empat belas November dua ribu dua puluh tiga), -----
 nomor : AHU-0070143.AH.01.02.TAHUN 2023, diubah dengan akta -----
 tertanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga), --
 nomor : 7012, dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
 persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-01-2024 (lima Januari --
 dua ribu dua puluh empat), nomor : AHU-0000753.AH.01.02.TAHUN 2024, --
 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -----
 database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal -----
 05-01-2024 (lima Januari dua ribu dua puluh empat), -----
 nomor : AHU-AH.01.03-0003714 dan nomor : AHU-AH.01.09-0005489, -----
 terakhir diubah dengan akta tertanggal tanggal 06-08-2024 (enam Agustus ---
 dua ribu dua puluh empat), nomor : 1945, dibuat di hadapan saya, Notaris, ---
 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -----
 database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal -----
 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh empat), -----
 nomor : AHU-AH.01.09-0242878; -----
 - (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
 - Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 -----
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pemegang saham -----
dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua -----
pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang -----
saham memberikan persetujuan tertulis untuk usulan tersebut. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 UUPT, keputusan yang diambil dengan -----
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Bahwa pada saat ini modal dasar perseroan berjumlah -----
Rp. 398.616.006.384,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam -----
ratus enam belas juta enam ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah), ----
yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham -----
sebesar Rp. 199.308.003.192,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar -----
tiga ratus delapan juta tiga ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah), -----
terbagi atas 23.237.496 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu ----
empat ratus sembilan puluh enam) saham, masing-masing saham bernilai ---
Rp. 8.577,- (delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) per saham. ----
- Bahwa para pemegang saham perseroan adalah : -----
- 1. SOFTWAREONE AG, selaku pemegang dan pemilik 23.230.525 (dua ----
puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima) -----
saham dalam Perseroan; -----
- 2. SOFTWAREONE PTE. LTD., selaku pemegang dan pemilik 6.971 -----
(enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham dalam Perseroan; ----
- Bahwa para pemegang saham telah memberikan persetujuan secara -----
tertulis mengenai keputusan seperti tersebut di bawah ini. -----
- Bahwa para pemegang saham setuju untuk memutuskan hal-hal -----
tersebut di bawah ini dan setuju untuk melaksanakan Keputusan Tertulis ----
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT tersebut di atas, maka ----
para pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis untuk : -----
- I. Untuk menyetujui perubahan alamat kantor pusat Perseroan dari yang ----

semula beralamat di Gedung Palma One Lantai 9, Suite 905, Jalan HR. ---
Rasuna Said Kavling X-2 nomor 4, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta menjadi beralamat di Menara Rajawali Lantai ----
18, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega -----
Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; -----

II. Untuk menyetujui penyesuaian dan penambahan bidang usaha Aktivitas --
Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI --
62029) dan Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan dengan Itu (KBLI ----
63112) pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ----
tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; -----

III. Sehubungan dengan poin II tersebut di atas, menyetujui perubahan -----
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang -----
Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti ---
Lunak; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. **Kode KBLI 46511. Perdagangan Besar Komputer dan -----
Perlengkapan Komputer.** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan --
perlengkapan komputer; -----

b. **Kode KBLI 46512. Perdagangan Besar Piranti Lunak.** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak; ---

c. **Kode KBLI 62029. Aktivitas Konsultasi Komputer dan -----
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.** -----

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan -----
konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa -----

dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan -----
 perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat --
 keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. -----
 Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna ----
 komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar ----
 yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini -----
 dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan -----
 piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau -----
 komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. -----
 Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya ---
 menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna -----
 sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian -----
 sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di -----
 tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait; -----

d. **Kode KBLI 62090. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa -----**

Komputer Lainnya. -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa -----
 komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum -----
 diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan -----
 komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi ----
 perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden -----
 dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha -----
 yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam -----
 golongan 6201-6202; -----

e. **Kode KBLI 63112. Aktivitas Hosting dan Ybdi.** -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan -----
 dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan -----
 data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti -----
 web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di -----
 sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing); -----

IV. Untuk memberi kuasa dengan hak substitusi baik bersama-sama -----

maupun sendiri-sendiri kepada Tuan MOHAMMAD IQBAL HADROMI, ---
Sarjana Hukum tersebut, dari Kantor Hukum HADROMI & PARTNERS, ---
untuk membuat Keputusan Tertulis tersebut dalam akta Notaris dan -----
selanjutnya untuk hadir di hadapan Notaris, untuk membuat dan -----
menandatangani Keputusan Tertulis tersebut sebagai akta resmi, untuk ---
menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan -----
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan -----
melakukan semua tindakan yang dianggap perlu; -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menyatakan : -----
- dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas -----
penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya -----
atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini; -----
- apabila di kemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa ----
dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh -----
penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan -----
dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka -----
membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang -----
terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan ----
atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, -----
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan -----
melalui kuasanya atau pengacaranya; -----
- apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut -----
di atas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap -----
Notaris dan atau pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini -----
memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan -----
saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan -----
terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut di atas -----
pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacaranya, -----

tidak ada yang dikecualikan; -----

- dengan dilakukan pembacaan akta ini maka penghadap yang -----
bertanggung jawab atas isi akta ini; -----

- apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta ---
otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan -----
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta -----
akta (akta otentiknya). -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang ----
diterima saat ini. -----

- Dari segala yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

- sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal -----
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ALISSA ANASTIANI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 26-01-1993 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VIII, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan --
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175046601930003; -----
2. Tuan AHMAD ARIS IQBAL, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 10-09-1991 (sepuluh September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Bambu Apus Nomor 28, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan ---
Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3175101009910001; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- karena penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena -----
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, -----
maka Akta ini tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan -----

saksi-saksi, akan tetapi akta hanya diparaf perhalaman oleh penghadap, ----
para saksi dan saya, Notaris. -----

- Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada -----
lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian -----
sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006166.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SOFTWAREONE INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO S.H. sesuai salinan akta nomor 3530 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SOFTWAREONE INDONESIA tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025020331240113 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SOFTWAREONE INDONESIA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SOFTWAREONE INDONESIA - dengan NPWP 028752871063000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 3530 Tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2025.



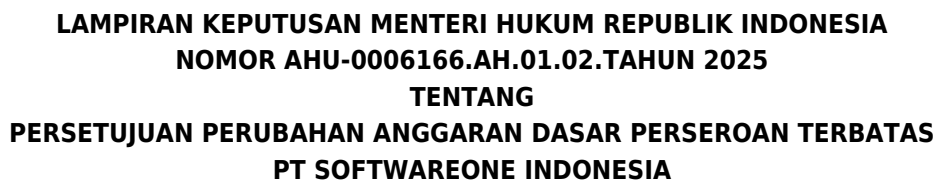
a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Stephen

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0019515.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 03 Februari 2025



1. Modal Dasar : Rp. 398.616.006.384
2. Modal Ditempatkan : Rp. 199.308.003.192
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RAPHAEL HERMANN ERB	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
UCOK DANIEL SIAHAAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANK ARNOLDO ROSSINI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SOFTWAREONE AG	BADAN HUKUM	-	23.230.525	Rp. 199.248.212.925
SOFTWAREONE PTE., LTD.	BADAN HUKUM	-	6.971	Rp. 59.790.267

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2025.



 a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0019515.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 03 Februari 2025



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275101602750007

Nama : UCOK DANIEL SIAHAAN
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 16-02-1975
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : CITRA GRAN BLOK B.5/10
RT/RW : 001/011
Kel/Desa : JATIKARYA
Kecamatan : JATISAMPURNA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BEKASI
29-03-2018

No. Surat Pesanan : EP-01KAHZQ6JWV26A9W87ZBG71JYX
Tanggal Surat Pesanan : 21 Nov 2025, 14:06:07 WIB

Pemesan

DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Nama Penanggung Jawab : Mochamad Santoso
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
NPWP Pemesan : 080.848.170.9-606.000
Alamat Pemesan : Kampus Sukolilo. Jl. Raya Its, Sukolilo Surabaya 60111

Penyedia

SOFTWAREONE INDONESIA
Nama Penanggung Jawab : UCOK DANIEL SIAHAAN
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 002.875.287.1-063.000
Alamat Penyedia : Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Kota Adm. Jakarta Selatan. 12730

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Digital Import Power BI Pro Edu Sub Per User (NK5-00001) 7,00 pcs <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KAHZQ6 JWV26A9W87ZBG71JYX&orderKey=9af2764c-4c6 f-4308-bdcd-743ce610 259b&productId=6ef74 46f-6699-4ecc-8756-b29ebd1823ac	Rp405.000,00	7,00
Digital Import M365 Extra Storage CAO Edu 10TB Sub Add-on (YGP-00001) 22,00 pcs <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KAHZQ6 JWV26A9W87ZBG71JYX&orderKey=9af2764c-4c6 f-4308-bdcd-743ce610 259b&productId=3689c 671-cc7b-4055-92a8-eb7c5935346	Rp53.544.375,00	22,00
Digital Import M365 Copilot Edu Sub Add-on (EP2-00538) 10,00 pcs <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KAHZQ6 JWV26A9W87ZBG71JYX&orderKey=9af2764c-4c6 f-4308-bdcd-743ce610 259b&productId=6b42d 4f1-cd87-44aa-99ab-9c3c3bb09863	Rp5.872.500,00	10,00
Digital Import M365 A3 Original Edu Sub Per User (AAA-73004) 1.148,00 pcs <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KAHZQ6 JWV26A9W87ZBG71JYX&orderKey=9af2764c-4c6 f-4308-bdcd-743ce610 259b&productId=680c2 c29-ba4a-4339-a08a-f7ffc79204ac	Rp1.111.725,00	1.148,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp2.515.796.550,00
Termasuk:	
Harga Produk	

Estimasi Total PPN

Rp276.737.621,00

Termasuk:

Pajak Produk

Estimasi Total Pembayaran**Rp2.792.534.171,00****Skema Pembayaran**

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Mochamad Santoso (6281235932332)

Alamat : Kampus ITS Keputih Sukolilo Surabaya, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111

① Catatan Alamat

Gedung KPA Plaza Dr Angka Lt2 Kampus ITS Keputih Sukolilo

Tanggal Penyelesaian : 01 Desember 2025 - 01 Desember 2025

① Catatan Tanggal Penyelesaian

harap selesaikan tepat waktu

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

SOFTWAREONE INDONESIA

*Mochamad Santoso***Mochamad Santoso**
Pejabat Pembuat Komitmen*Ucok Daniel Siahaan***Ucok Daniel Siahaan**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Rektor yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di ITS.
 - 1.3 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK. pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - 1.4 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.5 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.6 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan atau badan usaha afiliasi ITS yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/ Jasa .
 - 1.7 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.8 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
 - 1.9 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.10 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian
- 1.11 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.15 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.16 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.18 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.19 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.20 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.
- 1.21 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK.
- 1.22 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | 3.1 | Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia. |
| | 3.2 | Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| 4. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | 4.1 | Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: <ul style="list-style-type: none">a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/ataub. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |
| | 4.2 | Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. |
| | 4.3 | Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pembuat Komitmen terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Pemberian sanksi pencairan jaminan2. Pemberian sanksi digugurkan dalam proses pemilihan3. Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan4. Pemberian sanksi ganti kerugian dan/atau pembayaran denda. |
| | 4.4 | Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PA/KPA. |
| | 4.5 | Pejabat Pembuat Komitmen yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5. Asal Barang | 5.1 | Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. |
| | 5.2 | Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. |
| | 5.3 | Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). |
| | 5.4 | Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. |

- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
b. Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
6. Korespondensi
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Surat Perjanjian, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
7. Wakil sah para pihak
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Surat Perjanjian. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Perpajakan
- Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia yang dapat mensubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1 dan butir 9.2 adalah Penyedia dengan kualifikasi kecil dan dapat melakukan KSO dengan syarat pekerjaan tersebut adalah termasuk pekerjaan khusus
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.

Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

A. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | | |
|--|------|--|
| 11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | 11.1 | Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. |
| | 11.2 | Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian. |
| 12. Surat Perintah Pengiriman | 12.1 | Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |
| | 12.2 | Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. |
| | 12.3 | SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 12.4 | Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 12.5 | Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| 13. Lingkup pekerjaan | | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. |
| 14. Standar | | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar. |
| 15. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | 15.1 | Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. |

- | | | |
|------------------------|------|--|
| | 15.2 | Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen. |
| | 15.3 | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. |
| 16. Inspeksi Pabrikasi | 16.1 | Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 16.2 | Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. |
| | 16.3 | Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak. |
| 17. Pengepakan | 17.1 | Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK. |
| | 17.2 | Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| 18. Pengiriman | 18.1 | Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. |
| | 18.2 | Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. |
| | 18.3 | Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya. |
| 19. Asuransi | 19.1 | Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. |
| | 19.2 | Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. |
| | 19.3 | Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 19.4 | Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak. |

20. Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
21. Pemeriksaan dan Pengujian
- 21.1 Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 21.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 21.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Pembuat Komitmen.
- 21.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 21.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
22. Uji Coba
- 22.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait.
- 22.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 22.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian.

- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 23.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.
- 23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud pada klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
24. **Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
25. **Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak.
26. **Pemberian Kesempatan**
- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat dalam Addendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu

penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- 26.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

B. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|-------------------------|--|
| 27. Serah Terima Barang | 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk serah terima barang. |
| | 27.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis. |
| | 27.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan SSKK. |
| | 27.5 Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak. |
| | 27.6 Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak. |
| | 27.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia. |
| | 27.8 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. |
| | 27.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| | 27.10 Pejabat Pembuat Komitmen menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (apabila diperlukan). |

- 27.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
28. Jaminan bebas Cacat Mutu/
Garansi
- 28.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 28.3 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 29.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

C. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan Kontrak
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan

- gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- peristiwa kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
31. Keadaan Kahar
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Pandemi;
 - Endemi;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- 31.9 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

D. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 32. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.9. |
| 33. Pemutusan kontrak | <p>33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak Penyedia.</p> <p>33.2 Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Pembuat Komitmen.</p> |
| 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen | <p>34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;Penyedia berada dalam keadaan pailit;Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.2 ; |

- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.2 , Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSUK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 33, maka:
 - a. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
 - 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian.
 - 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 36. Berakhirnya Kontrak
 - 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

E. Pejabat Pembuat Komitmen

- 37. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
 - 37.1 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- c. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
- i. Menilai kinerja Penyedia.

37.2 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka;
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

F. PENYEDIA

38. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

38.1 Penyedia mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan kontrak.

38.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Penandatanganan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

39. **Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
40. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.
41. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
42. **Penanggungan dan Risiko**
- 42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 42.2 Terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir Masa Pemeliharaan sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
43. **Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga** 43.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 43.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 44. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen
 - Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam Surat Perjanjian dan SSKK.
- 45. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia
 - 45.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 45.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
 - 45.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
 - 45.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 46. Sanksi Finansial
 - 46.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 46.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 46.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
 - 46.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 47. Laporan Hasil Pekerjaan
 - 47.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- | | | |
|-------------------------|------|--|
| | 47.2 | Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. |
| | 47.3 | Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Pembuat Komitmen. |
| 48. Kepemilikan Dokumen | 48.1 | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen. |
| | 48.2 | Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu keputusan Kontrak. |
| | 48.3 | Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK. |

G. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | | |
|-------------------|------|---|
| 49. Nilai Kontrak | 49.1 | Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. |
| | 49.2 | Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga |
| 50. Pembayaran | 50.1 | Uang muka <ul style="list-style-type: none">a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian untuk: pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/ataub. besaran uang muka ditentukan dalam Surat Perjanjian dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;c. dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umume. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). |
| | 50.2 | Prestasi pekerjaan <ul style="list-style-type: none">a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian. |

- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 50.3 Sanksi Finansial
- Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan
- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 - b. Denda Keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
51. Perhitungan Akhir
- 51.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Addendum Kontrak (apabila ada).
 - 51.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

- | | |
|----------------------------|--|
| 52. Penangguhan Pembayaran | 52.1 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. |
| | 52.2 Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. |
| | 52.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. |
| | 52.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia. |
| 53. Penyesuaian Harga | 53.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK. |
| | 53.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap untuk semua jenis kontrak termasuk kontrak lumsom dan kontrak harga satuan jangka panjang |
| | 53.3 penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam penawaran |
| | 53.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak. |
| | 53.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. |
| | 53.6 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dn jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. |
| | 53.7 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran. |
| | 53.8 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. |
| | 53.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. |
| | 53.10 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |

H. PENGAWASAN MUTU

- | | | | | | |
|---|--|------|--|------|--|
| 54. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. | | | | |
| 55. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen | <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">55.1</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">55.2</td><td>Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</td></tr></table> | 55.1 | Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. | 55.2 | Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan. |
| 55.1 | Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. | | | | |
| 55.2 | Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan. | | | | |
| 56. Cacat Mutu | Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. | | | | |
| 57. Pengujian | Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. | | | | |

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---|------|---|------|--|------|---|
| 58. Itikad Baik | <table border="0"><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">58.1</td><td>Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">58.2</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">58.3</td><td>Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">58.4</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</td></tr></table> | 58.1 | Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. | 58.2 | Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. | 58.3 | Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. | 58.4 | Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak. |
| 58.1 | Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. | | | | | | | | |
| 58.2 | Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. | | | | | | | | |
| 58.3 | Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. | | | | | | | | |
| 58.4 | Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak. | | | | | | | | |
| 59. Penyelesaian Perselisihan | 59.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai. | | | | | | | | |

- 59.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 59.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.
- 59.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

-
- | | |
|--|--|
| A. Pengertian | <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya2. Tempat Tujuan Akhir adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya |
| B. Korespondensi | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja PPK:
Nama : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Alamat : Kampus ITS, Sukolilo Surabaya
Telepon : 031 5964379
Faksimili : 031 5964379</p> <p>Penyedia:
Nama : PT. SoftwareONE Indonesia
Alamat : Menara Rajawali Lt. 18 - Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telepon : 021-5761515
Faksimili : -</p> |
| C. Wakil Sah Para Pihak | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK : Mochamad Santoso
Untuk Penyedia : Ucok Daniel Siahaan</p> |
| D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 11 (sebelas) hari kalender; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2025, dan semua lisensi akan aktif hingga tanggal 30 November 2026.</p> |
| E. Pengiriman | <p>Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : berita acara pemeriksaan dan serah terima yang sudah ditandatangani oleh PPK dan jaminan purna jual
Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.</p> |
| F. Serah Terima | <p>Serah terima dilakukan pada : Kampus ITS, Sukolilo Surabaya</p> |
| G. Pemeriksaan dan Pengujian | <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: barang/Lisensi sudah datang sesuai spesifikasi teknis dan terinstal dengan baik.2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: DTSI Kampus ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya |

- H. Garansi
1. Jaminan Purnajual : 1 tahun garansi
- I. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- J. Pembayaran
1. Pekerjaan Pengadaan Lisensi A3 Microsoft dan Penambahan Kapasitas Storage M365 ITS Tahun 2025 tidak diberikan uang muka
 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 100% setelah pekerjaan selesai dengan cara ditransfer ke rekening atas nama PT. Softwareone Indonesia dengan nomer rekening 0012088000- IDR, Bank Deutsche Bank
 3. Sanksi Finansial :
 1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia melalui rekening yang ditetapkan oleh PPK.
 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender
 4. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yang belum terselesaikan sebelum PPN.
- K. Harga kontrak
- Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan RKAT ITS Tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,792,534,171,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak pemerintah
- L. Penyelesaian Perselisihan
1. Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.



No. Surat Pesanan : EP-01KAHZQ6JWV26A9W87ZBG71JYX
No. BAST : 114/IT2.XII.85/B/LK.02.08/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 21 November 2025, 14:06:04 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-03-WRQ8RKP
Tanggal BAST Dibuat : 3 December 2025, 12:55:06 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

693416 - DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER)

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Nama Penanggung Jawab : Mochamad Santoso
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
NPWP Pemesan : 080.848.170.9-606.000
Alamat Pemesan : Kampus Sukolilo, Jl. Raya Its, Sukolilo Surabaya 60111

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

SOFTWAREONE INDONESIA

Nama Penanggung Jawab : UCOK DANIEL SIAHAAN
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0028752871063000
Alamat Penyedia : Menara Rajawali Lt. 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Kota Adm. Jakarta Selatan. 12730

Ringkasan Pekerjaan**Pekerjaan ke-1**

Nama Penerima : Mochamad Santoso (6281235932332)
Selesai Pengerjaan : 3 December 2025
Alamat Pekerjaan : Kampus Its Keputih Sukolilo Surabaya, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
Selesai Pemeriksaan : 3 December 2025

No.	Nama Pekerjaan	Detail Pekerjaan	Subtotal
1	Jasa Power BI Pro Edu Sub Per User (NK5-00001)	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp2.835.000,00
2	Jasa M365 Extra Storage CAO Edu 10TB Sub Add-on (YGP-00001)	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp1.177.976.250,00
3	Jasa M365 Copilot Edu Sub Add-on (EP2-00538)	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp58.725.000,00
4	Jasa M365 A3 Original Edu Sub Per User (AAA-73004)	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp1.276.260.300,00

Pada Hari ini tanggal **3 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh menyelesaikan jasa/pekerjaan sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KAHZQ6JWV26A9W87ZBG71JYX** serta adendumnya (apabila ada).
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian jasa/pekerjaan pada **3 December 2025** atas setiap progres pekerjaan yang telah dilakukan.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas jasa/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing **PIHAK** keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Mochamad Santoso
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ukok Daniel Siahaan
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



PT SOFTWAREONE INDONESIA

FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

AND

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



PT SOFTWAREONE INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

CONTENTS

Director's Statement

Exhibit

Statement of Financial Position

A

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

B

Statement of Changes in Equity

C

Statement of Cash Flows

D

Notes to the Financial Statements

E

Independent Auditor's Report



PT. Softwareone Indonesia

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
PT SOFTWAREONE INDONESIA
("THE COMPANY")**

I, the undersigned:

Name : Ucok Daniel Siahaan
Office Address : Menara Rajawali, 18th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Domicile as stated in ID Card : Citra Gran Blok B.5/10, RT 001, RW 011,
Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna
Kota Bekasi, Jawa Barat
Office Telephone : 021-5761515
Position : Director

State that:

1. I am responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner.
b. The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do they omit material information and facts.
4. I am responsible for the Company's internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, April 30, 2025



Ucok Daniel Siahaan
Director

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Notes</u>	<u>December 31, 2 0 2 4</u>	<u>December 31, 2 0 2 3</u>
ASSETS			
CURRENT ASSETS			
Cash in banks	4	47,339,422	50,978,621
Trade receivables - Net	5	502,333,776	275,599,296
Other receivables		65,607	269,516
Prepaid taxes	10	55,141,680	12,875,699
Prepaid expenses		3,270,543	5,527,587
Other financial assets		<u>5,556,631</u>	<u>1,163,277</u>
Total Current Assets		<u>613,707,659</u>	<u>346,413,996</u>
NON-CURRENT ASSETS			
Estimated claim for tax refund	10	88,352,091	86,065,672
Property, plant and equipment - Net	6	3,941,225	1,002,406
Right-of-use assets - Net	7	3,409,380	1,269,381
Security deposits		<u>477,551</u>	<u>149,936</u>
Total Non-Current Assets		<u>96,180,247</u>	<u>88,487,395</u>
TOTAL ASSETS		<u><u>709,887,906</u></u>	<u><u>434,901,391</u></u>

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Notes	December 31, 2024	December 31, 2023
LIABILITIES			
CURRENT LIABILITIES			
Trade payables	8	127,879,111	132,560,495
Other payables to third parties		33,348,878	13,504,893
Accrued expenses	9	10,769,587	10,850,838
Taxes payable	10	27,212,856	18,052,197
Derivative liabilities		92,586	3,482,007
Current portion of long-term liabilities:			
Lease liabilities	7	1,624,335	409,050
Shareholder loan	18	394,541,900	115,033,200
Total Current Liabilities		595,469,253	293,892,680
NON-CURRENT LIABILITIES			
Long-term liabilities - net of current portion:			
Lease liabilities	7	1,882,936	871,286
Shareholder loan	18	-	10,639,800
Post-employment benefits liabilities	11	8,301,235	5,816,438
Total Non-Current Liabilities		10,184,171	17,327,524
TOTAL LIABILITIES		605,653,424	311,220,204

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Notes</u>	<u>December 31, 2 0 2 4</u>	<u>December 31, 2 0 2 3</u>
EQUITY			
Share capital - par value of			
Rp 8,577 (full amount) per share			
Authorized - 46,474,992 shares			
Issued and fully paid capital -			
23,237,496 shares	12	199,308,003	199,308,003
Additional paid-in capital	13	29,110,884	29,110,884
Deficits		(123,101,859)	(104,118,449)
Other equity component		(1,082,546)	(619,251)
TOTAL EQUITY		<u>104,234,482</u>	<u>123,681,187</u>
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		<u>709,887,906</u>	<u>434,901,391</u>

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, April 30, 2025


Ucok Daniel Siahaan
 Director

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Notes	2 0 2 4	2 0 2 3
REVENUES	14	933,861,345	928,307,411
COST OF REVENUES	15	(858,563,828)	(862,321,454)
GROSS PROFIT		75,297,517	65,985,957
Marketing expenses		(894,743)	(765,393)
General and administrative expenses	16	(73,447,454)	(53,444,513)
Financial income		66,851	32,305
Financial expenses	17	(8,306,650)	(12,502,227)
Foreign exchange differences - Net		(11,770,471)	(13,092,600)
Other income		71,540	104,425
LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE		(18,983,410)	(13,682,046)
INCOME TAX EXPENSE		-	-
LOSS FOR THE YEAR		(18,983,410)	(13,682,046)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Item that will not be reclassified to profit or loss:			
Remeasurements on post-employment benefits liability	11	(463,295)	(376,292)
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR		(19,446,705)	(14,058,338)

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, April 30, 2025


Ucok Daniel Siahaan
 Director

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Note	Share capital	Additional paid-in capital	Deficits	Other equity component	Total equity
Balance as of January 1, 2023		44,308,001	29,110,884	(90,436,403)	(242,959)	(17,260,477)
Additional of share capital	12	155,000,002	-	-	-	155,000,002
Comprehensive loss for the year		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13,682,046)</u>	<u>(376,292)</u>	<u>(14,058,338)</u>
Balance as of December 31, 2023		199,308,003	29,110,884	(104,118,449)	(619,251)	123,681,187
Comprehensive loss for the year		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(18,983,410)</u>	<u>(463,295)</u>	<u>(19,446,705)</u>
Balance as of December 31, 2024		<u>199,308,003</u>	<u>29,110,884</u>	<u>(123,101,859)</u>	<u>(1,082,546)</u>	<u>104,234,482</u>

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Loss before income tax expense	(18,983,410)	(13,682,046)
Adjustments for:		
Unrealized loss on foreign exchange	12,614,134	3,858,016
Provision for post employment benefits	2,021,502	1,192,815
Amortization of right-of-use asset	865,194	446,773
Depreciation of property, plant and equipment	520,726	336,930
Reversal for impairment losses	(71,540)	(104,425)
Loss from operation before changes in working capital	(3,033,394)	(7,951,937)
Changes in working capital:		
Trade receivables	(226,662,940)	(160,944,464)
Other receivables	203,909	79,083
Prepaid taxes	(42,265,981)	36,373,527
Prepaid expenses	2,257,044	247,229
Advances	-	60,971,386
Estimated claim for tax refund	91,537	(63,797,582)
Trade payables	(4,681,384)	9,274,918
Other payables to third parties	19,843,985	10,320,404
Accrued expenses	(81,251)	3,405,778
Taxes payable	9,160,659	10,568,158
Cash flows used in operating activities	(245,167,816)	(101,453,500)
Proceeds from tax refund	5,087,247	2,568,471
Payment of tax	(7,465,203)	(7,574,314)
Net cash flows used in operating activities	(247,545,772)	(106,459,343)

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT SOFTWAREONE INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Additional of security deposit	(327,615)	(1,738)
Acquisitions of property, plant and equipment	(3,459,545)	(1,150,008)
Net cash flows provided by financing activities	<u>(3,787,160)</u>	<u>(1,151,746)</u>
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from shareholder loan	384,404,920	228,450,000
Receipt from additional of share capital	-	155,000,002
Payment of lease liabilities	(778,257)	(456,938)
Payment of shareholder loan	(135,932,930)	(245,544,250)
Net cash flows provided by financing activities	<u>247,693,733</u>	<u>137,448,814</u>
NET (DECREASE) INCREASE IN CASH IN BANKS	(3,639,199)	29,837,725
CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF YEAR	<u>50,978,621</u>	<u>21,140,896</u>
CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR	<u>47,339,422</u>	<u>50,978,621</u>

See Note 22 to the Financial Statements for
the supplemented disclosures of cash flows information

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and General Information

PT Softwareone Indonesia (“the Company”) was established within the framework of the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967, based on Notarial deed No. 9 dated May 16, 2011 of Suwanda, S.H., Mkn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0049816.AH.01.09.Year 2011 dated June 20, 2011 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 51785 dated September 21, 2012, Supplement No. 76.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently based on Notarial deed of Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., No. 7012 dated December 27, 2023, the shareholders approved to increase the authorized, issued and fully paid capital. The changes has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0000753.AH.01.02.Year 2024 dated January 5, 2024.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities comprises computer consulting services and computer management facility. The Company is domiciled in Jakarta Selatan, Indonesia, with its head office located at Menara Rajawali, 18th floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

b. Completion of the Financial Statements

The Board of Directors of the Company is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which have been finalized and approved for issuance on April 30, 2025.

c. Commissioner, Directors and Employees

Based on Notarial deed of Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., No. 1945 dated August 6, 2024 and No. 7012 dated December 27, 2023, members of the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are as follows:

		December 31, 2024	December 31, 2023
Commissioner	:	Frank Arnoldo Rossini	Frank Arnoldo Rossini
President Director	:	Raphael Herman Erb	Raphael Herman Erb
Director	:	Ucok Daniel Siahaan	Ucok Daniel Siahaan

The Company has approximately 60 and 44 permanent employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively (Unaudited).

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of the Financial Accounting Standards Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”).

The accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are consistent with the accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2023, except for the adoption of amendments effective January 1, 2024 as described below.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows presents receipts and payments of cash classified into operating, investing and financing activities. The cash flows are presented using the indirect method.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company.

b. Changes in Accounting Policies

Effective January 1, 2024, the reference numbers of the Statement of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretation of Financial Accounting Standard (“ISAK”) were reordered and amended based on those published by DSAK-IAI. This change in numbering does not affect the substance of the requirements in each PSAK and ISAK in Indonesian Financial Accounting Standard.

The adoption of amendments issued and effective for the financial year on or after January 1, 2024, which did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and has no material impact on the financial statements, are as follows:

- Amendments PSAK 201 (Formerly PSAK 1), “Presentation of Financial Statement” - Non-current Liabilities with Covenant;
- Amendments PSAK 116 (Formerly PSAK 73), “Leases” - Lease Liability in Sale and Leaseback; and
- Amendments to PSAK 207 (Formerly PSAK 2), “Statement of Cash Flows” - Supplies Finance Arrangements and PSAK 107 (Formerly PSAK 60), “Financial Instruments: Disclosures”.

As of the authorization date of the financial statements, the management is still in the process of evaluating the impact of the above amendments and new PSAK in the financial statements.

Effective on or after January 1, 2025:

- PSAK 117 (Formerly PSAK 74), “Insurance Contract”; and
- Amendments to PSAK 221 (Formerly PSAK 10), “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates” - Lack of Exchangeability.

Early adoption of the above amendments and new PSAK is permitted.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

c. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants in the principal or most advantageous market at the measurement date under current market conditions (i.e. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique at the measurement date.

The Company measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable; and
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

The Company determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.

d. Cash in Banks

Cash in banks consist of cash in bank which are neither pledged as collateral for loans nor restricted in use.

e. Financial Instruments

1. Financial Assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the two categories as follows:

- a. Financial assets at amortized cost; and
- b. Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss ("FVTPL") or Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVOCI").

PT SOFTWAREONE INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
 (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (Continued)

Initial recognition (Continued)

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition. The Company reclassifies a financial asset if, and only if, the Company's business model for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply. If the Company reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has no financial assets at FVTPL and FVOCI.

Subsequent measurement

Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less impairment, if any. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

Impairment of financial assets

In PSAK 109 (formerly PSAK 71), impairment loss provision of financial assets measured at Expected Credit Losses ("ECLs") model and applied for financial assets which are measured at amortized cost or FVOCI (debt instruments).

There are 2 (two) basis of the measurement of expected credit losses, 12-month expected credit losses or lifetime expected credit losses. The Company will analyze the initial recognition using the 12-month expected credit losses and will move to lifetime expected credit losses if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

In each reporting period, the Company assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When assessing the allowance for expected losses, the Company evaluates the risk of default that may occur over the expected life of the financial instrument in determining the amount of expected credit losses taking into account the availability of information on past events, current conditions and estimates of future economic conditions.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Financial Instruments (Continued)

2. Financial Liabilities

Initial recognition

Financial liabilities are classified as follows:

- a. Financial liabilities at amortized cost; and
- b. Financial liabilities at FVTPL.

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company only has financial liabilities at amortized cost.

Subsequent measurement

Financial liabilities at amortized cost are subsequently measured using the the effective interest rate method. The effective interest rate amortization is included in finance costs in profit or loss.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest rate amortization process.

3. Derecognition of Financial Instruments

Financial assets

The Company derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred to another entity, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but a contractual obligation is assumed to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company transfers a financial asset, it evaluates the extent to which they retain the risks and rewards of ownership of the financial asset.

Financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged, cancelled or expired.

4. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Company 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

f. Derivative Financial Instruments

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:

1. Its value changes in response to the change of underlying variable, such as: interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a nonfinancial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the “underlying variable”);
2. It requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and
3. It is settled at a future date.

The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contract, to hedge its foreign currency risks arising from United States Dollar denominated liabilities. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative is entered into and remeasured subsequently at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly in profit or loss, except for the effective portion of cash flow hedges, which is recognized in other comprehensive income.

Derivative instruments are classified as current or non-current based on an assessment of the facts and circumstances (i.e., the underlying contracted cash flows). When the Company will hold a derivative as an economic hedge and does not apply hedge accounting for a period beyond twelve months after the reporting date, the derivative is classified as non-current.

g. Transaction with Related Parties

The Company discloses transactions with related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Property, Plant and Equipment

Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost. Costs include the purchase price, directly attributable costs and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

h. Property, Plant and Equipment (Continued)

The Company has chosen the cost model as the accounting policy for its property, plant and equipment measurement. Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value. The depreciation is calculated on a straight-line basis over the following useful lives:

	<u>Years</u>
Leasehold improvement	3
IT Hardware	3
Furniture and fixtures	5

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted if appropriate, at each end of reporting period.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be reliably measured.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Company evaluates at each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss.

j. Leases

The Company as a lessee

The Company determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

j. Leases (Continued)

The Company as a lessee (Continued)

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets (ROU) at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Company is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of their estimated useful life and lease term, as follows:

	<u>Years</u>
Buildings	3

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

k. Employee Benefits

Short-term employment benefits

Short-term employment benefits represents compensation provided by the Company such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid which are recognized when they accrue to the employees.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
 (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

k. Employee Benefits (Continued)

Post-employment benefits

The Company recognized unfunded post-employment benefits liability in accordance with applicable labor regulations in Indonesia.

Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Defined benefit schemes surpluses and deficits are measured at:

- The fair value of planned assets at the reporting date; less
- Planned liabilities calculated using the projected-unit-credit method discounted to its present value using yields available on Government Bonds (considering currently, there is no deep market for high quality corporate bonds) that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus
- Unrecognized past service costs.

Remeasurements of the post-employment benefits liability are recognized directly within equity. The remeasurements include actuarial gains and losses.

Service costs are recognized in profit or loss, and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

Net interest expense (income) is recognized in profit or loss and is calculated by applying the discount rate used to measure the post-employment benefit liabilities (asset) at the beginning of the annual period to the balance of the post-employment benefit liabilities (asset) and considering the effects of contributions and benefit payments during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognized in the period in which the settlement occurs.

l. Share Capital

Share capital represents the total par value of the shares issued.

m. Deficits

Deficits represents the cumulative balance of profit or loss, dividend distributions, prior period adjustments, effects of changes in accounting policy and other capital adjustments.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

n. Revenue and Expenses Recognition

License Revenue

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Service Revenue

The Company provides the following Services: Software Portfolio Management (SPM), Software Portfolio Services (SPS), Software Asset Management (SAM), Security Services, IT Leverage System / VAR Business (ILS), Navision-Projects (ERP), Oracle License Management Services (LMS). Revenue is generally recognized as the services are performed. Maintenance and support contracts include mostly a time and response commitment made to the customer.

Expenses are recognized when these are incurred (accrual basis).

o. Foreign Currency

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the closing group exchange rates on those dates and the resulting net foreign exchange gains or losses are credited or charged in profit or loss.

Based on the group rates published by SoftwareOne Group as of December 31, 2024 and 2023, respectively, the exchange rates used are as follows:

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
1 United States Dollar	16,170	15,420
1 Euro	16,851	17,135

p. Taxation

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the statement of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilized those temporary differences and the unused tax losses carried forward.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
 (Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES POLICY INFORMATION (Continued)

q. Provisions and Contingencies

A provision is recognized when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. A provision is not recognized for future operating losses.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

a. Judgment made in applying accounting policies

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Income Taxes

The Company has exposure to income taxes. Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact on the current income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

Determination of Functional Currency

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company, the functional currency has been determined to be Rupiah, as this reflected the fact that majority of the Company's businesses are influenced by primary economic environment in which the Company operates and sales prices for services and goods in Rupiah currency.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

a. Judgment made in applying accounting policies (Continued)

Revenue from Contracts with Customers

The Company applied the following judgments that significantly affect the determination of the amount and timing of revenue from contracts with customers:

Identifying the specified good or service

The Company has the highest level of partnership and certification in the solutions it sells, with a large team of dedicated software and license advisors which interact with customers to understand the requirements of the customers' IT environments, and support the end customer throughout their selection, specification, acquisition, implementation and maintenance of software licenses.

Therefore, the Company identified the following promised goods and services in the contract for indirect sales of on premise software licenses:

- Providing advisory services; and
- Resale of a right to use license purchased from a software vendor

b. Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Provision for expected credit losses ("ECL")

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimates and assumptions (Continued)

Depreciation of Property, Plant and Equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. The Company's management properly estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 3 to 5 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Deferred Tax Assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at each reporting date and reduces deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Measurement of Lease Liabilities

Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term. The Company has determined the discount rate by reference to the respective lessee's incremental borrowing rate when the rate inherent in the lease is not readily determinable. The Company obtains the relevant market interest rate after considering the applicable geographical location where the lessee operates as well as the term of the lease. Management considers its own credit spread information from its recent borrowings, industry data available as well as any security available in order to adjust the market interest rate obtained from similar economic environment, term and value of the lease.

Employee Benefits

The present value of the defined benefit obligations depends on factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. These assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase rate. Any change in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the post-employment benefits liabilities.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase rate at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

For the future salary increase rate, the Company collects all historical data related to the changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

While the Company believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect their post-employment benefit liabilities and employee benefit and net employee benefit expense.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimates and assumptions (Continued)

Determination of Fair Value of Financial Instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values.

The Company presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- Level 1 - the fair value is based on quoted prices (unadjusted) in active markets;
- Level 2 - the fair value uses inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e., derived from prices); and
- Level 3 - the fair value uses inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs)

4. CASH IN BANKS

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Indonesian Rupiah	46,752,063	50,034,629
United States Dollar	587,359	943,992
Total	<u>47,339,422</u>	<u>50,978,621</u>

5. TRADE RECEIVABLES - NET

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Third parties	500,562,332	275,708,763
Related parties (Note 18)	2,009,311	199,940
Total	502,571,643	275,908,703
Less: Allowance for impairment losses	<u>(237,867)</u>	<u>(309,407)</u>
Net	<u>502,333,776</u>	<u>275,599,296</u>

The Company's management believes that the allowance for impairment losses on third party receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. The Company's management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

	December 31, 2024			Ending balance
	Beginning balance	Additions	Deductions	
<u>Acquisition cost</u>				
Leasehold improvement	694,872	2,905,821	541,173	3,059,520
IT hardware	1,951,635	503,724	631,087	1,824,272
Furniture and fixtures	43,591	50,000	43,591	50,000
Total	2,690,098	3,459,545	1,215,851	4,933,792
<u>Accumulated depreciation</u>				
Leasehold improvement	573,336	53,822	541,173	85,985
IT hardware	1,070,765	465,284	631,087	904,962
Furniture and fixtures	43,591	1,620	43,591	1,620
Total	1,687,692	520,726	1,215,851	992,567
Net book value	<u>1,002,406</u>			<u>3,941,225</u>
	December 31, 2023			Ending balance
	Beginning balance	Additions	Deductions	
<u>Acquisition cost</u>				
Leasehold improvement	541,173	153,699	-	694,872
IT hardware	955,326	996,309	-	1,951,635
Furniture and fixtures	43,591	-	-	43,591
Total	1,540,090	1,150,008	-	2,690,098
<u>Accumulated depreciation</u>				
Leasehold improvement	541,173	32,163	-	573,336
IT hardware	765,998	304,767	-	1,070,765
Furniture and fixtures	43,591	-	-	43,591
Total	1,350,762	336,930	-	1,687,692
Net book value	<u>189,328</u>			<u>1,002,406</u>

Depreciation expenses are apportioned to the following accounts:

	2 0 2 4	2 0 2 3
General and administrative expenses (Note 16)	<u>520,726</u>	<u>336,930</u>

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)

Based on the Company's management assessment, there were no events or changes in circumstances which might indicate impairment in the value of property, plant and equipment as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

7. LEASES

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
<u>Right-of-Use Assets - Net</u>		
Beginning balance	1,269,381	372,104
Addition	3,005,193	1,344,050
Amortization (Note 16)	(865,194)	(446,773)
Ending balance	<u>3,409,380</u>	<u>1,269,381</u>
<u>Lease Liabilities</u>		
Beginning balance	1,280,336	393,224
Addition	3,005,192	1,344,050
Lease payments	(778,257)	(456,938)
Ending balance	3,507,271	1,280,336
Less: Current portion	<u>1,624,335</u>	<u>409,050</u>
Long-term liabilities - Net of current portion	<u>1,882,936</u>	<u>871,286</u>

8. TRADE PAYABLES

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Third parties	113,972,874	97,013,052
Related parties (Note 18)	<u>13,906,237</u>	<u>35,547,443</u>
Total	<u>127,879,111</u>	<u>132,560,495</u>

9. ACCRUED EXPENSES

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Accrued salaries and commissions	6,714,655	5,171,641
Accrued purchases	1,882,124	2,786,486
Others	<u>2,172,808</u>	<u>2,892,711</u>
Total	<u>10,769,587</u>	<u>10,850,838</u>

Accrued purchases mainly consist of pending publisher invoices related to the December sales.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAXATION

a. Prepaid tax

	December 31, 2024	December 31, 2023
Income tax article 21	151,814	-
Value Added Tax - Input	54,989,866	12,875,699
Total	<u>55,141,680</u>	<u>12,875,699</u>

b. Estimated claim for income tax refund

	December 31, 2024	December 31, 2023
Corporate income tax:		
- Year 2024	7,465,203	-
- Year 2023	7,574,314	7,574,314
- Year 2022	-	5,178,784
- Year 2019	7,497,744	7,497,744
Value Added Tax 2023	65,814,830	65,814,830
Total	<u>88,352,091</u>	<u>86,065,672</u>

- (i) Until completion date of the financial statements, the Company is still in the process of tax audit regarding the estimated claim for tax refund of Corporate Income Tax Fiscal year 2023.
- (ii) On May 29, 2024, the Company received the Decision of the Director General of Taxation No. KEP-00114/PPH/KPP.0413/2024 for the Corporate Income Tax Fiscal year 2022 amounted to Rp 5,123,738,798 (full amount). On June 5, 2024, the Company received tax refund amounted to Rp 5,087,247,458 (full amount) net with several tax compensations amounted to Rp 36,491,340 (full amount). The difference between the Company's estimated claims for income tax refund and receive tax refund was charged to statement of profit or loss in current year.
- (iii) On September 19, 2022 the Company submitted an appeal for the remaining amount of Rp 7,497,743,250 (full amount) regarding the SKPLB of Income Tax for Fiscal Year 2019 and SKPKB of Income Tax articles 21, 23, 26, 4(2) and VAT Offshore. As of the completion date of financial statements, the decision from Tax Court has not yet been received.
- (iv) The Company has decided to restitute for the overpayments of Value-Added Tax period December 2023 amounted to Rp 65,814,830,243 (full amount). Until the date of the completion of these financial statements, the Company is still in the process of tax audit.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAXATION (Continued)

c. Taxes payable

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Income taxes:		
- Article 4(2)	39,832	337
- Article 21	-	253,732
- Article 23	79,899	183,952
- Article 26	25,732,202	12,571,183
Value Added Tax - Offshore	1,360,923	5,042,993
Total	<u>27,212,856</u>	<u>18,052,197</u>

d. Fiscal computation

The reconciliation between loss before income tax expense, as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively, are as follows:

	2 0 2 4	2 0 2 3
Loss before income tax expense	(18,983,410)	(13,682,046)
Temporary difference	1,964,244	1,125,757
Permanent difference	<u>3,525,514</u>	<u>5,542,980</u>
Estimated fiscal loss for the year	(13,493,652)	(7,013,309)
Fiscal loss carried forward from prior years	(33,312,659)	(30,556,035)
Expired fiscal loss and adjustment	<u>8,115,764</u>	<u>4,256,685</u>
Accumulated fiscal losses carried forward	(38,690,547)	(33,312,659)
Tax credit:		
Income tax article 23	<u>7,465,203</u>	<u>7,574,314</u>
Estimated claim for tax refund	<u><u>7,465,203</u></u>	<u><u>7,574,314</u></u>

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAXATION (Continued)

d. Fiscal computation (Continued)

	December 31, 2024	December 31, 2023
Summary of accumulated fiscal losses carried forward:		
- Year 2024	(13,493,652)	-
- Year 2023	-	(7,013,309)
- Year 2021	(17,403,917)	(17,403,917)
- Year 2020	(7,395,740)	(7,395,740)
- Year 2019	(397,238)	(1,499,693)
Total	<u>(38,690,547)</u>	<u>(33,312,659)</u>

The Company submits an annual tax on its own calculation ("Self assessment") in accordance with the Law of the General Provisions and Tax Procedures effective on January 1, 2008. The Tax Office may set or change the amount of tax liability within a limit of 5 (five) years from the date when the tax becomes due.

e. Deferred tax

	December 31, 2024	December 31, 2023
Deferred tax assets:		
Tax losses carried forward	8,511,920	7,328,784
Post-employment benefits liabilities	1,826,272	1,279,616
Allowance for impairment losses	52,331	68,069
Property, plant and equipment	<u>54,919</u>	<u>49,149</u>
Total	10,445,442	8,725,618
Valuation allowance of deferred tax assets	<u>(10,445,442)</u>	<u>(8,725,618)</u>
Deferred tax assets - Net	<u>-</u>	<u>-</u>

The utilization of deferred tax assets recognized by the Company is dependent upon future taxable income in excess of profits resulting from the reversal of existing taxable temporary differences. A valuation allowance for deferred tax assets has been established as there is no sufficient evidence that it is probable that deferred tax assets can be utilized.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The post-employment benefits liabilities as of December 31, 2024 and 2023 were determined by KKA Riana dan Rekan, an independent actuary, in its reports dated January 31, 2025 and 2024, respectively. The principal assumptions used in determining the post-employment benefits liability as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Discount rate	7.00%	6.75%
Salary increment rate	5.00%	5.00%
Mortality rate	100% TMI IV	100% TMI IV
Disability rate	5% TMI IV	5% TMI IV
Resignation rate	10% p.a. before the age of 30 then decrease linearly to 0% at age 55	10% p.a. before the age of 30 then decrease linearly to 0% at age 55
Proportion of normal retirement	100%	100%
Normal retirement age	55	55

The amounts recognized in profit or loss are as follows:

	2 0 2 4	2 0 2 3
Current service cost	1,635,910	905,006
Interest cost	385,592	287,809
Total (Note 16)	<u>2,021,502</u>	<u>1,192,815</u>

The amounts recognized in other comprehensive income are as follows:

	2 0 2 4	2 0 2 3
Experience adjustments	623,078	140,335
Changes in actuarial assumptions	(159,783)	235,957
Total remeasurements recognized in other comprehensive income	<u>463,295</u>	<u>376,292</u>

The movements in the liability recognized in the statement of financial position are as follows:

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
Beginning balance	5,816,438	4,247,331
Total cost recognized in profit or loss	2,021,502	1,192,815
Total remeasurements recognized in other comprehensive income	<u>463,295</u>	<u>376,292</u>
Ending balance	<u>8,301,235</u>	<u>5,816,438</u>

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the possible changes that enough for any significant assumptions on the present value of employee benefits at the end of the reporting period, assuming that all other assumptions are used regularly:

<u>Actuary assumptions</u>	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
Discount rate +1%	7,704,081	5,357,435
Discount rate -1%	8,967,988	6,330,875
Salary increment rate +1%	9,022,298	6,369,227
Salary increment rate -1%	7,647,004	5,316,944

The weighted average duration of the post-employment benefits liability as of December 31, 2024 and 2023 are 11.84 years and 12.76 years, respectively.

Distribution of Benefit Payment

	<u>December 31, 2 0 2 4</u>	<u>December 31, 2 0 2 3</u>
Less than 1 year	147,841	123,243
Between 2 - 5 years	2,706,887	1,328,984
Between 6 - 10 years	17,339,630	8,921,068
Over 10 years	47,694,219	32,438,097

12. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders and their respective share ownerships as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

<u>Shareholders</u>	<u>Total shares</u>	<u>Percentage of ownership (%)</u>	<u>Issued and fully paid capital (Rp)</u>
SoftwareONE AG	23,230,525	99.97	199,248,213
SoftwareONE Pte. Ltd.	6,971	0.03	59,790
Total	<u>23,237,496</u>	<u>100.00</u>	<u>199,308,003</u>

Based on Notarial deed of Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., No. 7012 dated December 27, 2023, the shareholders approved to increase the authorized capital from Rp 44,308,001,493 (full amount) to Rp 398,616,006,384 (full amount) which consists of 46,474,992 shares with par value of Rp 8,577 (full amount) per share and increase the issued and fully paid capital from Rp 44,308,001,493 (full amount) to Rp 199,308,003,192 (full amount) which consists of 23,237,496 shares with par value of Rp 8,577 (full amount) per share. The changes has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0000753.AH.01.02.Year 2024 dated January 5, 2024.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents the foreign exchange difference on paid-in capital resulting from the foreign exchange rate used upon receipts of the paid-in capital and the exchange rate stated in the Company's articles of association amounted to Rp 29,110,884 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

14. REVENUES

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
License	877,159,249	882,138,339
Service	<u>56,702,096</u>	<u>46,169,072</u>
Total	<u>933,861,345</u>	<u>928,307,411</u>

15. COST OF REVENUES

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
License	829,936,362	832,092,594
Service	<u>28,627,466</u>	<u>30,228,860</u>
Total	<u>858,563,828</u>	<u>862,321,454</u>

16. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
Salaries, wages and welfare	32,862,462	23,326,024
Information technology	23,320,667	14,893,995
Professional fee	3,681,567	3,534,194
Entertainment	2,771,977	2,219,514
Employee benefit (Note 11)	2,021,502	1,192,815
Depreciation and amortization (Notes 6 and 7)	1,385,920	783,703
Car expense	1,029,276	831,017
Office supply	861,776	1,109,534
Other	<u>5,512,307</u>	<u>5,553,717</u>
Total	<u>73,447,454</u>	<u>53,444,513</u>

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

17. FINANCIAL EXPENSES

	2 0 2 4	2 0 2 3
Interest expense	8,114,944	11,769,316
Bank charges	191,706	732,911
Total	<u>8,306,650</u>	<u>12,502,227</u>

18. RELATED PARTIES INFORMATION

a. The Nature of Related Parties

The details of nature of related parties are as follows:

- i. Related parties which have the same management as the Company
Companies using the name “SoftwareONE” elsewhere in this report
- ii. The Company’s shareholder
SoftwareONE AG
SoftwareONE Pte. Ltd.
- iii. Comparex AG have the same shareholder as the Company
- iv. SWON IT Services México SA de CV have the same shareholder as the Company

b. Summary

Trade receivables (Note 5)

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
SoftwareONE AG	1,689,281	-
SoftwareONE Australia Pty. Ltd.	191,382	171,310
SoftwareONE Pte. Ltd.	35,624	-
SoftwareONE India Private Ltd.	25,183	-
SoftwareONE Japan K.K.	12,876	3,793
SoftwareONE Korea Co. Ltd.	11,838	2,105
SoftwareONE Hong Kong Ltd.	11,638	-
SoftwareONE Philippines Corp.	9,545	2,437
SoftwareONE Taiwan Limited	7,811	2,541
SoftwareOne Experts Sdn Bhd Malaysia	6,446	7,828
SoftwareONE Co., Ltd.	5,116	-
SoftwareONE (Shanghai) Trading Co., Ltd.	2,571	-
SoftwareONE Inc.	-	8,051
SoftwareONE Netherlands B.V.	-	1,875
Total	<u>2,009,311</u>	<u>199,940</u>

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

18. RELATED PARTIES INFORMATION (Continued)

b. Summary (Continued)

Trade payables (Note 8)

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
SoftwareONE AG	11,099,570	30,117,293
SoftwareONE Pte. Ltd.	1,343,723	3,802,354
SoftwareONE Hong Kong Ltd.	718,988	777,167
SoftwareONE Bulgaria EOOD	314,008	3,002
SoftwareONE India Private Ltd.	238,949	743,903
SoftwareONE France SAS	74,366	-
SoftwareONE Deutschland GmbH	31,258	37,804
SoftwareONE (Shanghai) Trading Co., Ltd.	29,126	31,010
SWON IT Services México, S.A. de CV.	16,379	18,709
SoftwareONE Licensing Experts SRL	14,410	8,512
SoftwareONE Comercio e	11,410	7,689
SoftwareONE Costa Rica S.A.	10,741	-
SoftwareONE Spain S.A.	3,309	-
Total	<u>13,906,237</u>	<u>35,547,443</u>

Shareholder loan

	December 31, 2 0 2 4	December 31, 2 0 2 3
SoftwareONE AG	<u>394,541,900</u>	<u>125,673,000</u>

Based on loan agreements dated August 29, 2024, September 13, 2024 and November 29, 2024, the Company received a loan from SoftwareONE AG with the conditions as follows:

Purpose	: Working capital.
Interest	: Currency reference rate + country spread + corporate spread.
Prepayment of loan	: The Company has the option to prepay either in part or in full the said loan at any time during its tenure.
Due date	: August 29, 2025, September 13, 2025 and November 29, 2025.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

19. CONTINGENT LIABILITIES

Bank	Purpose of use	2 0 2 4		
		Total	Date	
			From	Until
Deutsche Bank AG, Jakarta	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Rokan	3.945.548	03/12/2024	29/04/2026
	Bank guarantee facility for PT Perusahaan Gas Negara Tbk	99.000	04/01/2024	14/02/2025
	Bank guarantee facility for Universitas Indonesia	158.203	28/12/2023	11/02/2025
	Bank guarantee facility for BPJS Kesehatan Kantor Pusat	4.640.022	10/11/2022	02/03/2026
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Trans Kontinental	273.466	16/06/2022	01/05/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina (Pesero) Direktorat Penunjang Bisnis Procurement I	12.006.734	23/07/2021	22/03/2025
	Bank guarantee facility for BPJS Kesehatan	256.543	26/11/2024	03/02/2025
	Bank guarantee facility for BPJS Kesehatan	231.120	06/11/2024	21/01/2025
	Bank guarantee facility for PT Indonesia Comnet Plus	68.920	05/11/2024	21/02/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Mahakam			
	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga			
	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	782.497	20/12/2024	29/04/2026
	Bank guarantee facility for PT Patra Jasa	87.690	30/08/2024	03/05/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina EP			
	PT Pertamina Hulu Energi OSES			
	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	1.591.992	14/11/2024	19/08/2026
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Rokan	3.945.548	05/11/2024	28/03/2026
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Energi			
	PT Pertamina Hulu Indonesia			
	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	933.065	01/11/2024	24/02/2026
	Bank guarantee facility for PT PGAS Solution	108.678	18/10/2024	01/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Rokan	6.655.839	18/10/2023	04/03/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Energi	3.659.538	03/03/2023	18/07/2025
	Bank guarantee facility for Job Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi	194.500	27/09/2022	13/03/2026
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Energi			
	PT Pertamina Hulu Indonesia			
	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	933.065	13/12/2024	02/05/2026

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

19. CONTINGENT LIABILITIES (Continued)

Bank	Purpose of use	2024		
		Total	Date	
			From	Until
Deutsche Bank AG, Jakarta	Bank guarantee facility for PT Asuransi BRI Life	30,500	14/10/2024	31/01/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Marine Engineering	89,040	04/12/2024	03/12/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Rokan	755,169	04/12/2024	29/04/2026
	Bank guarantee facility for Universitas Gajah Mada	77,814	28/11/2024	08/02/2025
	Bank guarantee facility for PT Elnusa Tbk	511,566	28/11/2024	16/01/2026
	Bank guarantee facility for PT Bursa Efek Indonesia	132,000	13/11/2024	21/02/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Hulu Rokan	755,169	04/11/2024	28/03/2026
	Bank guarantee facility for PT Patra Jasa	68,756	01/11/2024	07/01/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Gas	180,316	31/10/2024	13/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina (Persero)	4,656,410	15/08/2024	14/10/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Trans Kontinental	145,131	14/10/2024	12/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Patra Jasa	46,065	21/08/2024	04/04/2025
	Bank guarantee facility for PT Patra Jasa	27,750	14/10/2024	06/05/2025
	Bank guarantee facility for PT Kilang Pertamina Internasional	1,898,524	08/10/2024	12/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Training and Consulting	74,357	08/10/2024	22/08/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Patra Niaga	1,541,943	08/10/2024	12/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Kilang Pertamina Internasional	1,898,524	02/10/2024	14/09/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Internasional Shipping	623,751	02/10/2024	14/10/2025
	Bank guarantee facility for PT Bursa Efek Indonesia	1,123,650	12/09/2024	09/03/2025
	Bank guarantee facility for PT Bursa Efek Indonesia	717,600	12/09/2024	09/03/2025
	Bank guarantee facility for PT Asuransi BRI Life	27,550	15/02/2024	31/01/2025
	Bank guarantee facility for PT Pertamina Drilling Services	91,193	25/10/2024	21/11/2025
	Total	<u>56,044,746</u>		

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. Further explanations are provided in the following paragraphs.

Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values.

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash in banks, trade receivables, other receivables, other financial assets, trade payables, other payables, accrued expenses, shareholder loan, derivative liabilities and lease liabilities reasonably approximate their fair values due to short-term maturities.

21. RISK MANAGEMENT

Overview and General Description

The Company had exposure to risks of financial instruments as follows:

- Credit risks
- Market risks
- Liquidity risks
- Operational risks
- Capital risks management

a. Credit risks

Credit risks are the Company's main risks, which are losses due to risks caused by customers' inability to repay their debts to the Company. If the amount of unpaid debts could not be settled are big and significant, it will affect the Company's revenue, performance and financial health seriously.

The risks management applied by the Company is regular checking and verification of account receivables before delivering services, routine monitoring of the age of receivables and follow up on collection of receivables. An impairment analysis is performed at each reporting date using a provision matrix to measure expected credit losses. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments with similar loss patterns.

b. Market risks

Market risks are risks of losses caused by changes of the market variables such as the interest rates, foreign currency rates, etc.

The risks management applied by the Company is placement of appropriate levels of cash in foreign currency, only US dollars, and the rest in the local currency, Indonesian Rupiah, to protect against fluctuations in foreign currency exchange rates against the local currency.

This note describes information regarding of the Company's exposure to every risks above and the Company's objective and policy in measuring and managing these risks.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

21. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risks

Liquidity risks are risks of losses caused by discrepancies between receipts and payments. A significant discrepancy will reduce the Company's ability to pay its debts on due dates.

The risks management applied by the Company are as follows:

- Keep the appropriate level of cash in bank to remain liquid.
- Monitor the cash in banks regularly and periodically to ensure adequate cash surplus is maintained.
- Ensure that receipt of the amount of receivables due in a period is comparable to or greater than payment of the amount of debts that matures in the same period.

d. Operational risks

Operational risks are risks of losses caused by failure of the information technology system, human errors in operations, and weaknesses in operational procedure. These risks could incur losses which would affect the Company's performance and financial health.

The risks management applied by the Company are as follows:

- Always encourage the implementation of good corporate governance, prudent professional and transparent to all divisions within the organization.
- Constantly improve, evaluate and improve the internal control system in order to obtain an adequate level of internal control.
- Setting up backup and recovery plan adequate for the Company's main application systems, both in terms of hardware and software.

e. Capital risk management

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the shareholders and stakeholders.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure operation on the optimal capital structure and adequate return on the shareholders' fund, taking into the consideration the efficiency of use of capital based on the operating cash flow and capital expenditures and also consideration of future capital needs.

PT SOFTWAREONE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

22. NOTES SUPPORTING STATEMENT OF CASH FLOWS

Non-cash transactions from financing activities are shown in the reconciliation of liabilities from financing transaction below:

	2 0 2 4				
	Beginning	Cash inflows	Cash outflows	Non-cash	Ending
Lease liabilities	1,280,336	-	(778,257)	3,005,192	3,507,271
Shareholder loan	125,673,000	384,404,920	(135,932,930)	20,396,910	394,541,900
Total	<u>126,953,336</u>	<u>384,404,920</u>	<u>(136,711,187)</u>	<u>23,402,102</u>	<u>398,049,171</u>

	2 0 2 3				
	Beginning	Cash inflows	Cash outflows	Non-cash	Ending
Lease liabilities	393,224	-	(456,938)	1,344,050	1,280,336
Shareholder loan	141,548,320	228,450,000	(245,544,250)	1,218,930	125,673,000
Total	<u>141,941,544</u>	<u>228,450,000</u>	<u>(246,001,188)</u>	<u>2,562,980</u>	<u>126,953,336</u>



Tel : +62-21 2258 0218
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant

West Jakarta - Branch Office
Branch Licence No. 377/KM.1/2020
Puri Indah Financial Tower 19th Floor
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8
Jakarta 11610 - Indonesia

No. : 00101/3.0424/AU.1/05/1853-2/1/IV/2025

Independent Auditor's Report

The Shareholders, Commissioner and Directors
PT Softwareone Indonesia

Opinion

We have audited the financial statements of PT Softwareone Indonesia ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA
License No. AP.1853



April 30, 2025

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



PT. SoftwareOne Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **Ucok Daniel Siahaan**
Jabatan : **Direktur**
Perusahaan : **PT. SoftwareONE Indonesia**
Alamat : **Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 – Indonesia**

Dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan untuk memenuhi dan melaksanakan Pengadaan Microsoft Campus Agreement Universitas Indonesia Tahun 2026 sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Menyediakan support selama 1 tahun sesuai dengan masa aktif lisensi dengan menyediakan dukungan teknis selama 24 jam secara on call.
 - a. Alamat : Menara Rajawali Lt. 18, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 – Indonesia
 - b. No, tlp : 021 576 1515
 - c. Jumlah Staf : 1 Orang

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2025

PT SoftwareONE Indonesia



Ucok Daniel Siahaan
Direktur



December 5, 2025

To: PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA

WHEREAS Microsoft Corporation, with business address at One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, and its Affiliates is a global producer of software and services. Microsoft works with distributors, resellers and others ("business entities"), who carry out commercial transactions for Microsoft products and services. These business entities enter into contracts directly with customers, and are independent from Microsoft. Microsoft is the sole manufacturer of Microsoft products which can be procured through such business entities.

We confirm that PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA headquartered at the below address (hereinafter, the "Partner") has the following active agreements:

PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA (Partner ID: 3528712)
Menara Rajawali, 18th Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
JAKARTA, Jakarta - 12950
Indonesia

Agreement Name and Type: Channel Partner Terms and Conditions (Reseller)

Authorised Program(s): Academic Select Plus, Enrollment for Education Solutions (EES), Enterprise Agreements (Indirect EA), Get Genuine Windows Agreement (GGWA) Large Organizations, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), School, Select Plus, Services Provider License Agreement (SPLA), Unified Broker

Status: Active

This entitles them to do business in the following territories:

Authorised Territory(s): Republic of Indonesia and Timor Leste



This letter is issued at the request of PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA and does not subject Microsoft Corporation or any of its affiliates to any liability for obligations that PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA assumed by itself and at its own risk with third parties and does not grant any Microsoft intellectual property rights to any party. We make no representation about the financial strength or capabilities of the above company and nothing in this letter is to be seen as a recommendation on the part of Microsoft to select a particular partner or that the partner named here is the only partner authorized to supply the foregoing Microsoft products.

This letter is valid for 90 days from the date of issuance.

Best Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emily Grindberg".

Authorized Signer
Emily Grindberg

Duly authorized,
Microsoft Corporation



December 5, 2025

Pokja Pemilihan 4 Kantor Pemilihan Penyedia Universitas Indonesia
Gedung Science Park Lantai 1
Kampus UI Depok

To whom it may concern,

On July 18, 2023, the Microsoft Partner Network was renamed to the Microsoft AI Cloud Partner Program. In the Microsoft Partner Network, a partner's technical capabilities in Microsoft products or technologies were demonstrated by attaining silver and gold competencies.

For the purposes of in-progress Request For Proposal (RFP), this letter confirms that the partner named below did hold the legacy Microsoft Partner Networks competencies listed below and is still able to receive the benefits associated with them.

SoftwareONE AG (Partner ID: 1018747)
Riedenmatt 4
STANS, Nidwalden - 6370
Switzerland

Legacy competencies : Demonstrate technical capabilities in Microsoft products or technologies.

- Gold Messaging
- Gold Application Integration
- Gold DevOps
- Gold Data Analytics
- Gold Data Platform
- Gold Enterprise Resource Planning
- Gold Project and Portfolio Management
- Gold Communications
- Gold Application Development
- Gold Collaboration and Content
- Gold Cloud Platform



- Gold Datacenter
- Gold Cloud Productivity
- Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
- Gold Enterprise Mobility Management
- Gold Windows and Devices
- Gold Security
- Silver Cloud Customer Relationship Management
- Silver Cloud Business Applications
- Silver ISV

In the new Microsoft AI Cloud Partner Program, competencies are no longer offered. Instead, partners can attain Solutions Partner designations to showcase their organization's technical capabilities, experience, and ability to deliver successful customer outcomes aligned to the Microsoft Cloud.

SoftwareONE AG is currently doing business with Microsoft in the following locations:

- PERIFEL, MX, San Pedro Garza Garcia (San Pedro Garza Garcia) (Partner ID: 501500)
- SoftwareONE CZ s.r.o. (former COMPAREX CZ) (PRAHA) (Partner ID: 501790)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (ex CPX) (Leipzig) (Partner ID: 501973)
- SoftwareONE Danmark ApS (ex CPX) (Birkørød) (Partner ID: 503654)
- SoftwareONE Puerto Rico, PR, Guaynabo (Guaynabo) (Partner ID: 506484)
- SoftwareONE ESPAÑA S A (ex CPX) (Madrid) (Partner ID: 512746)
- 바이소프트, KR, 서울시 강남구 테헤란로 63길 14 (서울시 강남구 테헤란로 63길 14) (Partner ID: 530234)
- SoftwareONE France S.A.S (ex CPX) (Louviciennes) (Partner ID: 560480)
- SoftwareONE, Inc. (Milwaukee) (Partner ID: 565365)
- SoftwareONE Norway AS, NO, OSLO (ex CPX) (OSLO) (Partner ID: 685008)
- SOFTWAREONE PTE. LTD., SG, SINGAPORE (SINGAPORE) (Partner ID: 722004)
- SoftwareONE Luxembourg SARL, LU, Luxembourg (Luxembourg) (Partner ID: 753164)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (Poing) (Poing) (Partner ID: 833503)
- SoftwareONE AB, SE, Kista (ex CPX) (KISTA) (Partner ID: 858200)



- SoftwareONE UK Ltd., GB, HARROW (ex CPX) (HARROW) (Partner ID: 945114)
- SoftwareONE BE BV (ex CPX) (BRUSSEL) (Partner ID: 945776)
- SoftwareONE AG, CH, STANS (STANS) (Partner ID: 976307)
- SoftwareOne AG (former COMPAREX Solutions Schweiz), CH, Stans (Stans) (Partner ID: 985150)
- SoftwareONE Finland Oy (ex CPX) (Espoo) (Partner ID: 1002717)
- Centiq Ltd, GB, NOTTINGHAM (NOTTINGHAM) (Partner ID: 1012738)
- SoftwareONE Deutschland GmbH, DE, Leipzig (Leipzig) (Partner ID: 1019698)
- SoftwareONE Korea, KR, Seoul (Seoul) (Partner ID: 1037854)
- PERIFEL, MX, San Pedro Garza Garcia (San Pedro Garza Garcia) (Partner ID: 1099214)
- Centiq Ltd, GB, NOTTINGHAM (NOTTINGHAM) (Partner ID: 1438405)
- SoftwareONE Italia Srl (ex CPX) (SARONNO) (Partner ID: 1525471)
- SoftwareONE Netherlands B.V. (ex CPX) (AMSTERDAM) (Partner ID: 1555174)
- SoftwareOne Bulgaria EOOD, BG, SOFIA (Sofia) (Partner ID: 1568327)
- Brave New World Consulting Pty Ltd, AU, Melbourne (Melbourne) (Partner ID: 1700579)
- Brave New World Consulting Pty Ltd, AU, Melbourne (Melbourne) (Partner ID: 1700580)
- Ping IT S.R.L, BO, LA PAZ (LA PAZ) (Partner ID: 1935096)
- SoftwareONE Slovenija d.o.o. (Ljubljana) (Partner ID: 2040864)
- SoftwareOne Comércio e Serviços de Informática LTDA, BR, SÃO PAULO (Barueri) (Partner ID: 2104663)
- SoftwareONE Österreich GmbH (ex CPX) (WIEN) (Partner ID: 2118568)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (Leipzig) (Partner ID: 2145657)
- SOFTWAREONE UK LTD, GB, Wimbledon (Wimbledon) (Partner ID: 2205824)
- SoftwareONE Italia srl., IT, Rozzano S/N (Rozzano S/N) (Partner ID: 2210889)
- SoftwareONE B.V., NL, AMSTERDAM (AMSTERDAM) (Partner ID: 2319105)
- 硕软(上海)软件贸易有限公司, CN, 上海 (Shanghai) (Partner ID: 2377207)
- SoftwareONE Kazakhstan, KZ, ALMATY (ALMATY) (Partner ID: 2486596)
- SoftwareONE Ukraine (KIEV) (Partner ID: 2562376)
- Predica, PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 2619494)
- Predica, PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 2619495)
- SoftwareOne Experts Sdn. Bhd., MY, KUALA LUMPUR (KUALA LUMPUR) (Partner ID: 2746083)



- SoftwareONE Polska Sp. z o.o. (ex. CPX) (Warszawa) (Partner ID: 2852314)
- SoftwareONE Chile SpA, CL, SANTIAGO (SANTIAGO) (Partner ID: 2866024)
- SoftwareONE Finland OY (ESPOO) (Partner ID: 2973698)
- SoftwareONE France SAS, FR (Saint-Ouen-sur-Seine) (Partner ID: 3026138)
- SoftwareONE Argentina S.R.L., AR, CABA (CABA) (Partner ID: 3033741)
- SoftwareONE Uruguay Sp.A., UY, MONTEVIDEO (MONTEVIDEO) (Partner ID: 3033787)
- SoftwareONE Inc. (ex CPX) (Waukesha) (Partner ID: 3053304)
- SoftwareONE India Private Ltd. (Bangalore) (Partner ID: 3081350)
- Softwarepipeline S. DE R.L. DE C.V., MX, Mexico DF (Mexico DF) (Partner ID: 3113251)
- SoftwareONE Spain S.A. (Madrid) (Partner ID: 3124318)
- SoftwareONE Ireland, IE, Cork (Cork) (Partner ID: 3131258)
- Comparex Luxemburg S A, LU, Luxembourg (Luxembourg) (Partner ID: 3257092)
- COMPAREX Romania S.R.L., RO, BUCURESTI (BUCURESTI) (Partner ID: 3257113)
- SoftwareONE Österreich GmbH, AT, WIEN (WIEN) (Partner ID: 3323755)
- SoftwareONE India Private Limited (ex CPX Bangalore) (Bangalore) (Partner ID: 3333543)
- COMPAREX Serbia doo, RS, Belgrade (New Belgrade) (Partner ID: 3339629)
- SoftwareONE AB (KISTA) (Partner ID: 3417760)
- SoftwareONE IT Services Panamá, S.A. (Panamá City) (Partner ID: 3423846)
- SoftwareONE Australia Pty. Limited, AU, Sydney (Sydney) (Partner ID: 3425244)
- Yaima, S.A. SoftwareONE Guatemala, GT, GUATEMALA (GUATEMALA) (Partner ID: 3441379)
- SoftwareONE El Salvador, S.A. de C.V (SAN SALVADOR) (Partner ID: 3441380)
- SoftwareONE Co., Ltd., TH, Bangkok (Bangkok) (Partner ID: 3442150)
- SoftwareONE Nicaragua, S.A, (MANAGUA) (Partner ID: 3442535)
- SoftwareONE Honduras, S.A. (TEGUCIGALPA) (Partner ID: 3442550)
- SoftwareONE Costa Rica (Do not use) (SAN JOSE) (Partner ID: 3442700)
- SoftwareONE Colombia (Bogota) (Partner ID: 3442737)
- SoftwareONE Peru S.A.C (LIMA) (Partner ID: 3442754)
- SoftwareONE Philippines Corporation, PH, MAKATI CITY (MAKATI CITY)



(Partner ID: 3442763)

- SoftwareONE Norway AS, NO (Oslo) (Partner ID: 3445028)
- SoftwareONE India Private Limited (ex CPX New Delhi) (Bangalore) (Partner ID: 3512460)
- SoftwareONE Canada Inc., CA, Mississauga (Mississauga) (Partner ID: 3520125)
- SoftwareONE Hungary Kft. (BUDAPEST) (Partner ID: 3526744)
- SoftwareONE Czech Republic s.r.o., CZ, PRAHA (PRAHA) (Partner ID: 3526747)
- SoftwareONE Polska sp.z.o.o., PL, WARSZAWA (WARSZAWA) (Partner ID: 3526752)
- SoftwareONE Slovakia s.r.o., SK, BRATISLAVA (BRATISLAVA) (Partner ID: 3526755)
- SoftwareONE Japan Co., Ltd. (Tokyo) (Partner ID: 3528707)
- PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA (JAKARTA) (Partner ID: 3528712)
- SoftwareONE Aps, DK, Birkerød (Birkerød) (Partner ID: 3528725)
- COMPAREX Slovakia spol. s.r.o., SK, BRATISLAVA (BRATISLAVA) (Partner ID: 3549090)
- SoftwareONE Hong Kong Limited, HK, Hong Kong (Hong Kong) (Partner ID: 3650142)
- SoftwareONE Ecuador, EC, QUITO (QUITO) (Partner ID: 3663063)
- Software ONE Bolivia SRL, BO, LA PAZ (LA PAZ) (Partner ID: 3664621)
- SoftwareONE Dominican Republic, DO, Santo Domingo (Santo Domingo) (Partner ID: 3664658)
- SoftwareONE Taiwan Limited, TW, Taipei City (Taipei City) (Partner ID: 3664671)
- COMPAREX Indonesia PT., ID, JAKARTA (JAKARTA) (Partner ID: 3729718)
- SoftwareONE Licensing Experts Srl., RO, BUCURESTI (BUCURESTI) (Partner ID: 3768179)
- SoftwareONE Experts South Africa (PTY) Ltd., ZA, North Riding (North Riding) (Partner ID: 3768192)
- SOFTWARE ONE AG TRADING LLC, Dubai (Dubai) (Partner ID: 3768199)
- SoftwareONE West Indies S.A., LC, Gros Islet (Gros Islet) (Partner ID: 3770252)
- SoftwareONE BE BV (Brussels) (Partner ID: 3770311)
- SWON IT Services México, S.A. de C.V. (Mexico DF) (Partner ID: 3825699)



- SoftwareONE Deutschland GmbH (dummy - do not use) (Leipzig) (Partner ID: 3911273)
- SoftwareONE Ltd. Co., SA, Riyadh (Riyadh) (Partner ID: 3918255)
- SoftwareONE Vietnam Co. Limited (Ho Chi Minh City) (Partner ID: 4007491)
- SoftwareONE, Inc. (Dallas) (ex CPX) (Dallas) (Partner ID: 4060208)
- SoftwareONE Turkey Bilişim Teknolojileri Ticaret A.Ş. (Atasehir/Istanbul) (Partner ID: 4152712)
- COMPAREX BRASIL S.A., BR, São Paulo (São Paulo) (Partner ID: 4186569)
- SoftwareONE NZ, NZ, Auckland (Auckland) (Partner ID: 4288766)
- ITPC AG, CH, Zürich (Zürich) (Partner ID: 4369226)
- ITPC AG, CH, Zürich (Zürich) (Partner ID: 4369227)
- SoftwareONE Korea Co., Ltd., KR, GangNam-Gu (GangNam-Gu) (Partner ID: 4435243)
- COMPAREX Canada, Inc, CA, Toronto (Toronto) (Partner ID: 4603074)
- ITPC Consultancy Services Ltd., GB, London (London) (Partner ID: 4652288)
- ITPC India Pvt Ltd, IN, Pune (Pune) (Partner ID: 4722624)
- ITPC India Pvt Ltd, IN, Pune (Pune) (Partner ID: 4722625)
- COMPAREX AG, KR, Seoul (Seoul) (Partner ID: 4737952)
- COMPAREX AG, SG, Singapore (Singapore) (Partner ID: 4737959)
- SoftwareONE Middle East LLC (ex Predica) (Doha) (Partner ID: 4791420)
- SoftwareOne TURKEY BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR, Istanbul (Istanbul) (Partner ID: 4798672)
- SoftwareOne Denmark ApS (ex Predica) (Birkerød) (Partner ID: 4807375)
- SoftwareONE Israel, IL, Tel Aviv (Tel Aviv) (Partner ID: 4822857)
- 碩雲（上海）信息技术有限公司, CN, 上海 (上海) (Partner ID: 4830451)
- SoftwareONE AG, MU, Port Louis (Port Louis) (Partner ID: 4869420)
- COMPAREX AG, TH, Bangkok (Bangkok) (Partner ID: 4881678)
- SoftwareOne AG Trading LLC (ex Predica) (Dubai) (Partner ID: 4897513)
- SoftwareONE Trinidad & Tobago, TT, Port of Spain (Port of Spain) (Partner ID: 4990388)
- SoftwareONE Jamaica, JM, Kingston (Kingston) (Partner ID: 4990389)
- Centiq !Do not Use! (Nottingham) (Partner ID: 5083502)
- SoftwareONE AG, LB, Jal-El-Dib (Jal-El-Dib) (Partner ID: 5116539)
- SoftwareONE Egypt, EG, Obour City (Obour City) (Partner ID: 5116624)
- SoftwareONE AG Trading LLC (do not use) (Dubai) (Partner ID: 5138944)
- SE16N sp. z o.o., PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 5213651)



- SE16N sp. z o.o., PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 5213652)
- ITPC India Pvt. Ltd., IN, Pune (Pune) (Partner ID: 5256271)
- Ghana, GH, Accra (Accra) (Partner ID: 5283299)
- SoftwareOne Inc (ex Predica) (Milwaukee) (Partner ID: 5369243)
- Optimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington) (Partner ID: 6079335)
- Optimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington) (Partner ID: 6079336)
- SOFTWAREONE IT SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, CR, San Jose (San Jose) (Partner ID: 6118217)
- SoftwareONE Nederland BV. (ex CPX CSP) (Amsterdam) (Partner ID: 6244797)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (CSP) (Leipzig) (Partner ID: 6252639)
- SoftwareONE BE BV (ex CPX CSP), BE, Brussels (Brussels) (Partner ID: 6253527)
- SoftwareONE ESPAÑA, S.A. (ex CPX) (CSP) (Madrid) (Partner ID: 6253540)
- SoftwareONE Bern (Wallisellen) (Partner ID: 6282287)
- SoftwareONE TS-CH, CH, Wallisellen (Wallisellen) (Partner ID: 6349503)
- Centiq Ltd, US, Atlanta (Atlanta) (Partner ID: 6367121)
- SOFTWAREONE PROJECTS (PRIVATE) LIMITED (Colombo) (Partner ID: 6441065)
- SoftwareOne Deutschland GmbH (ex Predica) (Leipzig) (Partner ID: 6465383)
- Systematika Distribution Srl., IT, Saronno (Saronno) (Partner ID: 6488621)
- SOFTWAREONE PTE LTD Singapore (Indirect Reseller) (Singapore) (Partner ID: 6608301)
- Medalsoft International Co. Ltd. , CN, 上海市 (上海市) (Partner ID: 6893583)
- SoftwareONE Hong Kong Limited (Indirect Reseller) (Kwun Tong) (Partner ID: 6926929)
- SoftwareONE Pte Ltd, SG, Singapore (Singapore) (Partner ID: 7019519)
- SoftwareOne Brasil (SPLAR Incentives only), BR, Sao Paulo (Sao Paulo) (Partner ID: 7038914)
- SoftwareOne Ecuador (Enterprise Incentives), EC, Quito (Quito) (Partner ID: 7043079)



Best Regards,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ASmith".

Andrew Smith
General Manager, Partner Programs & Experiences

Microsoft Corporation



December 5, 2025

Pokja Pemilihan 4 Kantor Pemilihan Penyedia Universitas Indonesia
Gedung Science Park lantai 1
Kampus UI Depok

To whom it may concern:

I hereby confirm that SoftwareONE AG has satisfied the requirements for demonstrating and validating their technical capabilities in the Microsoft AI Cloud Partner Program.

SoftwareONE AG (Partner ID: 1018747)
Riedenmatt 4
STANS, Nidwalden - 6370
Switzerland

Solutions Partner : Demonstrate technical capabilities, experience, and ability to deliver successful customer outcomes aligned to the Microsoft Cloud.

- Solutions Partner for Infrastructure (Azure)
- Solutions Partner for Data & AI (Azure)
- Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)
- Solutions Partner for Business Applications
- Solutions Partner for Modern Work
- Solutions Partner for Security

Specializations : Validate deep technical expertise in specific technical scenarios aligned to the Microsoft Cloud.

- SAP on Azure
- Analytics
- Azure VMware Solution
- AI Platform on Microsoft Azure
- AI Platform on Microsoft Azure
- Agentic DevOps with Microsoft Azure and GitHub
- Low Code Application Development



- Low Code Application Development
- Adoption and Change Management
- Calling for Microsoft Teams
- Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams
- Teamwork Deployment
- Modernize Endpoints
- Cloud Security
- Identity and Access Management
- Data Security
- Threat Protection
- Infra and Database Migration
- Infra and Database Migration
- Sales
- Azure Virtual Desktop
- Migrate Enterprise Applications to Microsoft Azure
- Migrate Enterprise Applications to Microsoft Azure
- AI Apps on Microsoft Azure
- AI Apps on Microsoft Azure
- Copilot

Expert Programs : Evaluates a partners' people, processes, and tools and recognizes those who had proven expertise providing managed services across the end-to-end cloud lifecycle at scale. You distinguish your organization's sustainable, repeatable, and efficiently managed services across the full cloud lifecycle, allowing your customers to focus on their business priorities.

- Azure Expert Managed Service Provider (MSP)

To learn more about how these Microsoft designations represent this partner's capabilities, please visit: <https://aka.ms/MicrosoftSolutionsPartner>.



SoftwareONE AG is currently doing business with Microsoft in the following locations:

- PERIFEL, MX, San Pedro Garza Garcia (San Pedro Garza Garcia) (Partner ID: 501500)
- SoftwareONE CZ s.r.o. (former COMPAREX CZ) (PRAHA) (Partner ID: 501790)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (ex CPX) (Leipzig) (Partner ID: 501973)
- SoftwareONE Danmark ApS (ex CPX) (Birkørød) (Partner ID: 503654)
- SoftwareONE Puerto Rico, PR, Guaynabo (Guaynabo) (Partner ID: 506484)
- SoftwareONE ESPAÑA S A (ex CPX) (Madrid) (Partner ID: 512746)
- 바이소프트, KR, 서울시 강남구 테헤란로 63길 14 (서울시 강남구 테헤란로 63길 14) (Partner ID: 530234)
- SoftwareONE France S.A.S (ex CPX) (Louviciennes) (Partner ID: 560480)
- SoftwareONE, Inc. (Milwaukee) (Partner ID: 565365)
- SoftwareONE Norway AS, NO, OSLO (ex CPX) (OSLO) (Partner ID: 685008)
- SOFTWAREONE PTE. LTD., SG, SINGAPORE (SINGAPORE) (Partner ID: 722004)
- SoftwareONE Luxembourg SARL, LU, Luxembourg (Luxembourg) (Partner ID: 753164)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (Poing) (Poing) (Partner ID: 833503)
- SoftwareONE AB, SE, Kista (ex CPX) (KISTA) (Partner ID: 858200)
- SoftwareONE UK Ltd., GB, HARROW (ex CPX) (HARROW) (Partner ID: 945114)
- SoftwareONE BE BV (ex CPX) (BRUSSEL) (Partner ID: 945776)
- SoftwareONE AG, CH, STANS (STANS) (Partner ID: 976307)
- SoftwareOne AG (former COMPAREX Solutions Schweiz), CH, Stans (Stans) (Partner ID: 985150)
- SoftwareONE Finland Oy (ex CPX) (Espoo) (Partner ID: 1002717)
- Centiq Ltd, GB, NOTTINGHAM (NOTTINGHAM) (Partner ID: 1012738)
- SoftwareONE Deutschland GmbH,DE,Leipzig (Leipzig) (Partner ID: 1019698)
- SoftwareONE Korea,KR,Seoul (Seoul) (Partner ID: 1037854)
- PERIFEL,MX,San Pedro Garza Garcia (San Pedro Garza Garcia) (Partner ID: 1099214)
- Centiq Ltd,GB,NOTTINGHAM (NOTTINGHAM) (Partner ID: 1438405)
- SoftwareONE Italia Srl (ex CPX) (SARONNO) (Partner ID: 1525471)
- SoftwareONE Netherlands B.V. (ex CPX) (AMSTERDAM) (Partner ID: 1555174)
- SoftwareOne Bulgaria EOOD, BG, SOFIA (Sofia) (Partner ID: 1568327)



- Brave New World Consulting Pty Ltd,AU,Melbourne (Melbourne) (Partner ID: 1700579)
- Brave New World Consulting Pty Ltd, AU, Melbourne (Melbourne) (Partner ID: 1700580)
- Ping IT S.R.L, BO, LA PAZ (LA PAZ) (Partner ID: 1935096)
- SoftwareONE Slovenija d.o.o. (Ljubljana) (Partner ID: 2040864)
- SoftwareOne Comércio e Serviços de Informática LTDA, BR, SÃO PAULO (Barueri) (Partner ID: 2104663)
- SoftwareONE Österreich GmbH (ex CPX) (WIEN) (Partner ID: 2118568)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (Leipzig) (Partner ID: 2145657)
- SOFTWAREONE UK LTD, GB, Wimbledon (Wimbledon) (Partner ID: 2205824)
- SoftwareONE Italia srl., IT, Rozzano S/N (Rozzano S/N) (Partner ID: 2210889)
- SoftwareONE B.V., NL, AMSTERDAM (AMSTERDAM) (Partner ID: 2319105)
- 硕软(上海)软件贸易有限公司, CN, 上海 (Shanghai) (Partner ID: 2377207)
- SoftwareONE Kazakhstan, KZ, ALMATY (ALMATY) (Partner ID: 2486596)
- SoftwareONE Ukraine (KIEV) (Partner ID: 2562376)
- Predica,PL,Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 2619494)
- Predica, PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 2619495)
- SoftwareOne Experts Sdn. Bhd., MY, KUALA LUMPUR (KUALA LUMPUR) (Partner ID: 2746083)
- SoftwareONE Polska Sp. z o.o. (ex. CPX) (Warszawa) (Partner ID: 2852314)
- SoftwareONE Chile SpA, CL, SANTIAGO (SANTIAGO) (Partner ID: 2866024)
- SoftwareONE Finland OY (ESPOO) (Partner ID: 2973698)
- SoftwareONE France SAS, FR (Saint-Ouen-sur-Seine) (Partner ID: 3026138)
- SoftwareONE Argentina S.R.L., AR, CABA (CABA) (Partner ID: 3033741)
- SoftwareONE Uruguay Sp.A., UY, MONTEVIDEO (MONTEVIDEO) (Partner ID: 3033787)
- SoftwareONE Inc. (ex CPX) (Waukesha) (Partner ID: 3053304)
- SoftwareONE India Private Ltd. (Bangalore) (Partner ID: 3081350)
- Softwarepipeline S. DE R.L. DE C.V., MX, Mexico DF (Mexico DF) (Partner ID: 3113251)
- SoftwareONE Spain S.A. (Madrid) (Partner ID: 3124318)
- SoftwareONE Ireland, IE, Cork (Cork) (Partner ID: 3131258)
- Comparex Luxemburg S A, LU, Luxembourg (Luxembourg) (Partner ID: 3257092)
- COMPAREX Romania S.R.L., RO, BUCURESTI (BUCURESTI) (Partner ID:



3257113)

- SoftwareONE Österreich GmbH, AT, WIEN (WIEN) (Partner ID: 3323755)
- SoftwareONE India Private Limited (ex CPX Bangalore) (Bangalore) (Partner ID: 3333543)
- COMPAREX Serbia doo, RS, Belgrade (New Belgrade) (Partner ID: 3339629)
- SoftwareONE AB (KISTA) (Partner ID: 3417760)
- SoftwareONE IT Services Panamá, S.A. (Panamá City) (Partner ID: 3423846)
- SoftwareONE Australia Pty. Limited, AU, Sydney (Sydney) (Partner ID: 3425244)
- Yaima, S.A. SoftwareONE Guatemala, GT, GUATEMALA (GUATEMALA) (Partner ID: 3441379)
- SoftwareONE El Salvador, S.A. de C.V (SAN SALVADOR) (Partner ID: 3441380)
- SoftwareONE Co., Ltd., TH, Bangkok (Bangkok) (Partner ID: 3442150)
- SoftwareONE Nicaragua, S.A, (MANAGUA) (Partner ID: 3442535)
- SoftwareONE Honduras, S.A. (TEGUCIGALPA) (Partner ID: 3442550)
- SoftwareONE Costa Rica (Do not use) (SAN JOSE) (Partner ID: 3442700)
- SoftwareONE Colombia (Bogota) (Partner ID: 3442737)
- SoftwareONE Peru S.A.C (LIMA) (Partner ID: 3442754)
- SoftwareONE Philippines Corporation, PH, MAKATI CITY (MAKATI CITY) (Partner ID: 3442763)
- SoftwareONE Norway AS, NO (Oslo) (Partner ID: 3445028)
- SoftwareONE India Private Limited (ex CPX New Delhi) (Bangalore) (Partner ID: 3512460)
- SoftwareONE Canada Inc., CA, Mississauga (Mississauga) (Partner ID: 3520125)
- SoftwareONE Hungary Kft. (BUDAPEST) (Partner ID: 3526744)
- SoftwareONE Czech Republic s.r.o., CZ, PRAHA (PRAHA) (Partner ID: 3526747)
- SoftwareONE Polska sp.z.o.o., PL, WARSZAWA (WARSZAWA) (Partner ID: 3526752)
- SoftwareONE Slovakia s.r.o., SK, BRATISLAVA (BRATISLAVA) (Partner ID: 3526755)
- SoftwareONE Japan Co., Ltd. (Tokyo) (Partner ID: 3528707)
- PT SoftwareONE Indonesia, ID, JAKARTA (JAKARTA) (Partner ID: 3528712)
- SoftwareONE Aps, DK, Birkerød (Birkerød) (Partner ID: 3528725)



- COMPAREX Slovakia spol. s.r.o., SK, BRATISLAVA (BRATISLAVA) (Partner ID: 3549090)
- SoftwareONE Hong Kong Limited, HK, Hong Kong (Hong Kong) (Partner ID: 3650142)
- SoftwareONE Ecuador, EC, QUITO (QUITO) (Partner ID: 3663063)
- Software ONE Bolivia SRL, BO, LA PAZ (LA PAZ) (Partner ID: 3664621)
- SoftwareONE Dominican Republic, DO, Santo Domingo (Santo Domingo) (Partner ID: 3664658)
- SoftwareONE Taiwan Limited, TW, Taipei City (Taipei City) (Partner ID: 3664671)
- COMPAREX Indonesia PT., ID, JAKARTA (JAKARTA) (Partner ID: 3729718)
- SoftwareONE Licensing Experts Srl., RO, BUCURESTI (BUCURESTI) (Partner ID: 3768179)
- SoftwareONE Experts South Africa (PTY) Ltd., ZA, North Riding (North Riding) (Partner ID: 3768192)
- SOFTWARE ONE AG TRADING LLC, Dubai (Dubai) (Partner ID: 3768199)
- SoftwareONE West Indies S.A., LC, Gros Islet (Gros Islet) (Partner ID: 3770252)
- SoftwareONE BE BV (Brussels) (Partner ID: 3770311)
- SWON IT Services México, S.A. de C.V. (Mexico DF) (Partner ID: 3825699)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (dummy - do not use) (Leipzig) (Partner ID: 3911273)
- SoftwareONE Ltd. Co., SA, Riyadh (Riyadh) (Partner ID: 3918255)
- SoftwareONE Vietnam Co. Limited (Ho Chi Minh City) (Partner ID: 4007491)
- SoftwareONE, Inc. (Dallas) (ex CPX) (Dallas) (Partner ID: 4060208)
- SoftwareONE Turkey Bilişim Teknolojileri Ticaret A.Ş. (Atasehir/Istanbul) (Partner ID: 4152712)
- COMPAREX BRASIL S.A., BR, São Paulo (São Paulo) (Partner ID: 4186569)
- SoftwareONE NZ, NZ, Auckland (Auckland) (Partner ID: 4288766)
- ITPC AG, CH, Zürich (Zürich) (Partner ID: 4369226)
- ITPC AG, CH, Zürich (Zürich) (Partner ID: 4369227)
- SoftwareONE Korea Co., Ltd., KR, GangNam-Gu (GangNam-Gu) (Partner ID: 4435243)
- COMPAREX Canada, Inc, CA, Toronto (Toronto) (Partner ID: 4603074)
- ITPC Consultancy Services Ltd., GB, London (London) (Partner ID: 4652288)
- ITPC India Pvt Ltd, IN, Pune (Pune) (Partner ID: 4722624)



- ITPC India Pvt Ltd, IN, Pune (Pune) (Partner ID: 4722625)
- COMPAREX AG, KR, Seoul (Seoul) (Partner ID: 4737952)
- COMPAREX AG, SG, Singapore (Singapore) (Partner ID: 4737959)
- SoftwareONE Middle East LLC (ex Predica) (Doha) (Partner ID: 4791420)
- SoftwareOne TURKEY BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR, Istanbul (Istanbul) (Partner ID: 4798672)
- SoftwareOne Denmark ApS (ex Predica) (Birkerød) (Partner ID: 4807375)
- SoftwareONE Israel, IL, Tel Aviv (Tel Aviv) (Partner ID: 4822857)
- 碩雲（上海）信息技术有限公司, CN, 上海 (上海) (Partner ID: 4830451)
- SoftwareONE AG, MU, Port Louis (Port Louis) (Partner ID: 4869420)
- COMPAREX AG, TH, Bangkok (Bangkok) (Partner ID: 4881678)
- SoftwareOne AG Trading LLC (ex Predica) (Dubai) (Partner ID: 4897513)
- SoftwareONE Trinidad & Tobago, TT, Port of Spain (Port of Spain) (Partner ID: 4990388)
- SoftwareONE Jamaica, JM, Kingston (Kingston) (Partner ID: 4990389)
- Centiq !Do not Use! (Nottingham) (Partner ID: 5083502)
- SoftwareONE AG, LB, Jal-El-Dib (Jal-El-Dib) (Partner ID: 5116539)
- SoftwareONE Egypt, EG, Obour City (Obour City) (Partner ID: 5116624)
- SoftwareONE AG Trading LLC (do not use) (Dubai) (Partner ID: 5138944)
- SE16N sp. z o.o., PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 5213651)
- SE16N sp. z o.o., PL, Warszawa (Warszawa) (Partner ID: 5213652)
- ITPC India Pvt. Ltd., IN, Pune (Pune) (Partner ID: 5256271)
- Ghana, GH, Accra (Accra) (Partner ID: 5283299)
- SoftwareOne Inc (ex Predica) (Milwaukee) (Partner ID: 5369243)
- Optimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington) (Partner ID: 6079335)
- Optimum Consulting LLC, US, Mount Washington (Mount Washington) (Partner ID: 6079336)
- SOFTWAREONE IT SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, CR, San Jose (San Jose) (Partner ID: 6118217)
- SoftwareONE Nederland BV. (ex CPX CSP) (Amsterdam) (Partner ID: 6244797)
- SoftwareONE Deutschland GmbH (CSP) (Leipzig) (Partner ID: 6252639)
- SoftwareONE BE BV (ex CPX CSP), BE, Brussels (Brussels) (Partner ID: 6253527)
- SoftwareONE ESPAÑA, S.A. (ex CPX) (CSP) (Madrid) (Partner ID: 6253540)



- SoftwareONE Bern (Wallisellen) (Partner ID: 6282287)
- SoftwareONE TS-CH, CH, Wallisellen (Wallisellen) (Partner ID: 6349503)
- Centiq Ltd, US, Atlanta (Atlanta) (Partner ID: 6367121)
- SOFTWAREONE PROJECTS (PRIVATE) LIMITED (Colombo) (Partner ID: 6441065)
- SoftwareOne Deutschland GmbH (ex Predica) (Leipzig) (Partner ID: 6465383)
- Systematika Distribution Srl., IT, Saronno (Saronno) (Partner ID: 6488621)
- SOFTWAREONE PTE LTD Singapore (Indirect Reseller) (Singapore) (Partner ID: 6608301)
- Medalsoft International Co. Ltd. , CN, 上海市 (上海市) (Partner ID: 6893583)
- SoftwareONE Hong Kong Limited (Indirect Reseller) (Kwun Tong) (Partner ID: 6926929)
- SoftwareONE Pte Ltd, SG, Singapore (Singapore) (Partner ID: 7019519)
- SoftwareOne Brasil (SPLAR Incentives only), BR, Sao Paulo (Sao Paulo) (Partner ID: 7038914)
- SoftwareOne Ecuador (Enterprise Incentives), EC, Quito (Quito) (Partner ID: 7043079)

Best Regards,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ASmith".

Andrew Smith
General Manager, Partner Programs & Experiences

Microsoft Corporation

This information is current as of December 5, 2025 and this letter of certification is valid until January 4, 2026.



DEBY SANDRA

CONSULTANT - DIGITAL WORKPLACE SOFTWARE & CLOUD

WORK EXPERIENCE

July 2019 – Now : SoftwareONE Indonesia, Consultant - Digital Workplace Software & Cloud

Responsibility :

- Played a key leadership role on the design, deploy and implementation
- Generating documentation (Site Survey, Physical Acceptance Test, User Acceptance Test, System Documentation, Migration of Procedure)
- Generating document proposal for solution services
- Responsible for identifying, analyzing, measuring and managing project risks
- Coordinating with 3rd party or principle
- Maintain relationships between clients and company
- Attending meetings, writing report and giving presentation to clients / Partner / Event
- Conducting training to clients / customers

July 2018 – Jun 2019 : PT. Jasa Teknologi Informasi, Senior Technical Specialist

Responsibility :

- Present Cloud solutions and technical proposals to prospects and customers
- Direct the gathering of architecture, design, and presentation of solutions to meet the customer's needs through workshops and other activities.
- Support pre-sales, demonstrations, proofs of concepts, and evaluations
- Contribute to the team effort by sharing knowledge, documenting, helping maintain the team lab environment, and participating in team initiatives
- Competency leader
- Managing and monitoring all installed systems and infrastructure
- Installing, configuring, testing and maintaining operating systems, application software and system management tools
- Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability
- Provide 2nd and 3rd level support
- Liaise with vendors and other IT personnel for problem resolution

Dec 2017 – June 2018 : PT. Asaba Computer Indonesia, Senior System Engineer

Responsibility :

- Present Cloud solutions and technical proposals to prospects and customers
- Direct the gathering of architecture, design, and presentation of solutions to meet the customer's needs through workshops and other activities.
- Support pre-sales, demonstrations, proofs of concepts, and evaluations
- Contribute to the team effort by sharing knowledge, documenting, helping maintain the team lab environment, and participating in team initiatives

Dec 2015 – November 2017 : PT. Comparex Indonesia. Cloud Specialist

Responsibility :

- Present Cloud solutions and technical proposals to prospects and customers
- Direct the gathering of architecture, design, and presentation of solutions to meet the customer's needs through workshops and other activities.
- Support pre-sales, demonstrations, proofs of concepts, and evaluations
- Contribute to the team effort by sharing knowledge, documenting, helping maintain the team lab environment, and participating in team initiatives

SoftwareONE
Menara Rajawali 18th Floor
Jl. Dr. Ide anak Agung Gde
Agung Lot#5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia

Deby.sandra@softwareone.com

Industry Experience:
17 Years

IT Skills:

- Office 365
- Anti-Virus
- Design and Mapping Tools
- Desktop and Management Monitoring
- Microsoft Windows OS
- Mail Client and Migration Tool
- Networking
- Windows Server
- SMTP and Security
- Mail and Unified Server
- Virtualization
- Security
- ITSM

Language:

- English: fluent
- Bahasa Indonesia: Native

Education:

Bachelor's degree in
information Technology,
University YARSI



Aug 2014 – Dec 2015 : PT. Visionet Internasional, Deputy Manager

Responsibility :

- Lead and Manage a team of IT Personnel
- The design and development of integrated solutions using the latest Microsoft products and technologies. • Multi- site design, rollout and operational experience around core Microsoft Infrastructure component
- Stabilizing developed solutions using Microsoft methodologies in complex customer environments.
- Provide Development support for customer request and quoting for any custom work

Jan 2013 – Jul 2014 : PT. Andalan Nusantara Technology, Trainer

Responsibility :

- Providing technical support and training.
- Research and Development new products (VMware Sphere 5.1, IT Problem Management, Assessing Network security, Hardening, MOC 10135B, System Center 2012 (SCCM, SCSM, SCOM)

Apr 2008 – Jan 2013 : PT. Kairos Utama Indonesia, System Engineer

Responsibility :

- Providing technical support and training.
- Ensure stable operation Windows Active Directory and domain Controller.
- Responsible for the configuration of Windows 2003/2008 server including domain controllers, DNS, File Servers, Exchange 2007/2010 Server and Windows member servers
- Implement and maintain Windows 2003/2008 Active Directory, Domain and Group policy, Microsoft Lync and Edge
- Provide on-call business day technical support as well as participate.

PROJECT EXPERIENCE

- INTEGRATION MAIL – HYBRID O365, XL
- Upgrade Exchange 2016 to 2019, PNM
- Implementation Microsoft Intune, APP
- Infra Backend Local Support Services, sakaenergi.com
- Migration Services Office 365, sakaenergi.com
- Manage Service, PNM
- Microsoft Service Premier Support, PGN
- Migration Google Workspace Basic to Office 365 Kick Off Meeting, IJ
- Manage Service Cloud, APP
- Sinarmas Group - Microsoft Enterprise Agreement
- Pertamina - Microsoft Enterprise Agreement
- Implementation and Configure, & Migration M365, PT. Elnusa Tbk
- Office 365 Hybrid and Lync Hybrid at PT Perusahaan Gas Negara
- Implementation and Configure, & Migration M365 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
- Security M365 Stream 2, PT Pertamina Persero
- Assess, Design, Implementation and Configure, & Migration M365, University of Indonesia



- Design DC & DRC, Upgrade & Migration AD, Exchange & SQL to Latest version, Manage Service Support, Lembaga Penjamin Simpanan
- Assess, Design, Implementation and Migration SQL 2012 to SQL 2016, PNM
- Implementation Exchange Hybrid and Migration email to O365, DSF
- Azure Migration & Site Recovery at PT. Supernet
- EMS at PT. Erlangga Indonesia
- Office 365 Hybrid and Lync Hybrid at PT Perusahaan Gas Negara
- Cloud Office 365 Hybrid and Lync Hybrid at PT. Nutrifood Indonesia
- Lync Hybrid 2013 at PT. TMMIN
- Office 365 & Azure as IaaS at PT. Citilink Indonesia
- Cloud Office 365 and Active Directory at PT. Wijaya Karya
- Lync Hybrid 2013, Single Sign On and Office 365 at PT. Mitsui Leasing Indonesia
- Active Directory, WSUS and Restructure Network Architecture at PT. Citra Bonang
- Intune Implementation Services, AIA
- Bittitan Migration PGN to Pertamina, PGN

TRAINING & CERTIFICATION

- Microsoft Certified Trainer
- Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
- Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate
- Microsoft 365 Certified: Administrator Expert
- Microsoft Certified: Azure AI Fundamental
- Microsoft Certified: Azure Data Fundamental
- Microsoft Certified: Azure Fundamental
- Microsoft Certified: Security, Compliance & Identify Fundamental



Microsoft Certified Solutions Expert

DEBY SANDRA

Has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity Charter Member.

Date of achievement: September 26, 2016
Certification number: F808-6290

Microsoft
CERTIFIED
Solutions Expert

Satya Nadella
Chief Executive Officer



Yusuf

Senior Technical Consultant

SoftwareONE
Menara Rajawali 18th Floor
Jl. Dr. Ide anak Agung Gde Agung
Lot#5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia

Yusuf.yusuf@softwareone.com

Industry Experience:
21 Years

IT Skills:
• Microsoft certified Solution Expert
• Microsoft Server Infrastructure
• Microsoft Messaging and unified collaboration
• Microsoft Azure

Language:
• English: fluent
• Bahasa Indonesia: Native

Education:
Bachelor's degree in information system,
University Setia Budi Mandiri

WORK EXPERIENCE

July 2017 – Now : SoftwareONE Indonesia, Senior Technical Consultant, Delivery Lead

Responsibility :

- Played a key leadership role on the design, deploy and implementation
- Generating documentation (Site Survey, Physical Acceptance Test, User Acceptance Test, System Documentation, Migration of Procedure)
- Generating document proposal for solution services
- Responsible for identifying, analyzing, measuring and managing project risks
- Coordinating with 3rd party or principle
- Maintain relationships between clients and company
- Attending meetings, writing report and giving presentation to clients / Partner / Event
- Conducting training to clients / customers

August 2014 – Jun 2017 : PT. Comparex Indonesia, Technical Consultant

Responsibility :

- Played a key leadership role on the design, deploy and implementation
- Generating documentation (Site Survey, Physical Acceptance Test, User Acceptance Test, System Documentation, Migration of Procedure)
- Generating document proposal for solution services
- Responsible for identifying, analyzing, measuring and managing project risks
- Coordinating with 3rd party or principle
- Maintain relationships between clients and company
- Attending meetings, writing report and giving presentation to clients / Partner / Event
- Conducting training to clients / customers
- Prospecting new lead by cross-sell & up-sell all product
- Planning new strategic for marketing activities

Jan 2014 – July 2014 : PT. Citra Bonang, IT Network Head

Responsibility :

- Propose plan for network and system
- Presentation system design & project proposals to management
- Review and change existing IT Policy and IT SOP
- Redesign system and network architecture (including hardware & software technology, site locations, and integration of technologies)
- Be a leader of the implementation IT Policy covering IT facilities, IT Security and Ethics and IT Continuity Plan



August 2012 – Dec 2013 : PT. Smart Tbk. IT Network Head

Responsibility :

- Design and implement system and network configurations, system and network architecture (including hardware & software technology, site locations, and integration of technologies)
- Develop and creates procedures for installation, use, and troubleshooting of communications hardware and software
- Be a leader of the implementation proper IT Policy covering IT facilities, IT Security and Ethics and IT Continuity Plan
- Meet with vendors to discuss system requirements
- Presentation system design & project proposals
- Propose annual plan for network and system
- Detailed review on the milestones for every project

Sept 2008 – Oct 2010 : PT. Mitrasoft Infonet. Project Manager & Internal Coordinator

Responsibility :

- Played a key leadership role on the design, deploy and implementation
- Act as technical advisory for system engineers and customers
- Managing staff to ensure that all milestones are achieved within the agreed timeframes
- Generating documentation (Site Survey, Physical Acceptance Test, User Acceptance Test, System and Network Documentation, Migration of Procedure, Standard Operation Procedure)
- Responsible for identifying, analyzing, measuring and managing project risks
- Coordinating with 3rd party or principle
- Maintain relationships between clients and company
- Attending meetings, writing report and giving presentation to clients
- Review engineer team and report to IT Head division to improve their product knowledge
- Conducting transfer knowledge/training to internal and external

Feb 2003 – May 2008 : PT. Insan Dharma Nusa. IT Support & Networking

Responsibility :

- Responsible for diagnose & resolve hardware, software and network problem
- Implementation Wifi Access Point, Absence application , Call Centre Application by IP based
- Deployed new hardware, computer, server and evaluating new software & security risks
- Conduct daily backup and make sure the backup job running smoothly
- Monthly Report Submission to IT Manager



PROJECT EXPERIENCE

- Implementation and Configure, & Migration M365, PT. PGN LNG
- Security M365 Stream 2, PT Pertamina Persero
- Assess, Design, Implementation and Configure, & Migration M365, University of Indonesia
- Assess, Design, Implementation and Migration M365, PT. PGAS Solution
- Design DC & DRC, Upgrade & Migration AD, Exchange & SQL to Latest version, Manage Service Support, Lembaga Penjamin Simpanan
- Implementation and Configure, & Migration M365, PT. Elnusa Tbk
- Implementation and Configure, & Migration M365 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
- Assess, Design, Implementation and Migration SQL 2012 to SQL 2016, PNM
- Implementation Exchange Hybrid and Migration email to O365, DSF
- Azure Migration & Site Recovery at PT. Supernet
- EMS at PT. Erlangga Indonesia
- Office 365 Hybrid and Lync Hybrid at PT Perusahaan Gas Negara
- Cloud Office 365 Hybrid and Lync Hybrid at PT. Nutrifood Indonesia
- Lync Hybrid 2013 at PT. TMMIN
- Office 365 & Azure as IaaS at PT. Citilink Indonesia
- Cloud Office 365 and Active Directory at PT. Wijaya Karya
- Lync Hybrid 2013, Single Sign On and Office 365 at PT. Mitsui Leasing Indonesia
- Active Directory, WSUS and Restructure Network Architecture at PT. Citra Bonang
- Consolidate Physical Server to Virtual Server Hyper-V 2012 R2 at PT. Citra Bonang
- Re-design and restructure Network architecture at PT. Smart-Tbk
- Consolidate Physical Server to Virtual Server VMWare at PT. Smart-Tbk
- Restructure Active Directory, and Migrate Email System to Cloud Office 365 at PT. Smart-Tbk
- Restructure Active Directory, Email system and Citrix at PT. SOHO Group
- Desktop Management, Active Directory, WSUS and Email at PT. Exertainment (Celebrity Fitness)
- Virtualization and Email system at PT. Datacomm Diangraha
- Terminal Server at PT. Monica Hijau Lestari (Body shop)
- Backup, Firewall and Email System at PT. Pacific Place
- Archiving, Active Directory, Backup and Email System at PT. Mitrasoft Infonet, PT. Net Train Informatika & PT. Net Solutions
- Virtualization, Antivirus, WSUS, Firewall at PT. Ali Budiarmo (ABNR)
- Web Monitoring at PT. Tirta Investama (AQUA)
- Sub Domain at PT. Astra Rent a Car (TRAC)
- Web Gateway, Email, Mail Security, WSUS, Backup and Antivirus at PT. Yanmar Indonesia

TRAINING & CERTIFICATION

Microsoft Certified Solution Expert : Productivity Charter Member

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Certified: Fundamentals

Microsoft® Certified Solutions Associate: Office 365

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate



Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Microsoft® Certified Solutions Associate: Office 365

Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional

Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert.

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Certified: Data Analyst Associate

Microsoft Certified: Teams Administrator Associate

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Microsoft® Certified Solutions Associate: SQL 2016 Database

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Lync Server 2010

Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2008

Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Messaging Administrator on Exchange2010



Microsoft Certified Solutions Expert

YUSUF YUSUF

Has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity Charter Member.

Date of achievement: September 26, 2016
Certification number: F808-1421

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Satya", with a stylized flourish at the end.

Satya Nadella
Chief Executive Officer

Microsoft
CERTIFIED
Solutions Expert